



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

LAPOR!

2024

**LAPORAN
TAHUNAN
SP4N-LAPOR!**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional -
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

KATA PENGANTAR

Sesanti angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha*-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Laporan Tahunan Monitoring SP4N-LAPOR! ini memuat kinerja penyelesaian pengaduan pelayanan publik yang masuk selama bulan Januari hingga Desember 2024 melalui kanal aduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, laporan ini juga nantinya dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Mewakili pemerintah selaku Pejabat Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut membantu dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sehingga dapat terlaksana dengan cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
selaku Pejabat Pengelola Pengaduan
Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengaduan.....	4
1.4.1 Struktur Kelembagaan.....	4
1.4.2 Saluran Pengaduan.....	5
PENANGANAN PENGADUAN SP4N-LAPOR!.....	6
2.1 Rekapitulasi Jumlah Aduan	6
2.2 Klasifikasi Aduan	8
2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Sumber Aduan	8
2.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Aduan	9
2.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Subjek Aduan.....	9
2.2.4 Klasifikasi Berdasarkan Unit Instansi	10
2.3 Laju Verifikasi dan Tindaklanjut Aduan.....	12
2.4 Kegiatan yang Dilaksanakan	14
2.4.1 Monitoring dan Evaluasi.....	15
2.4.2 Bimbingan Teknis	16
2.4.3 Sosialisasi	17
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	19
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	20
4.1 Simpulan.....	21
4.2 Saran	21
PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pengaduan SP4N-LAPOR! Per Desember 2024	6
Tabel 2 Rekap Jumlah Pengaduan Berdasarkan Unit Instansi	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Aduan SP4N-LAPOR!	4
Gambar 2 Kanal Aduan SP4N-LAPOR!	5
Gambar 3 Jumlah Rata-rata Pengaduan SP4N-LAPOR! Tiap Bulan	6
Gambar 4 Grafik Rekap Jumlah Aduan SP4N-LAPOR! Tiap Tahun	7
Gambar 5 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Sumber	8
Gambar 6 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Jenis	9
Gambar 7 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Subjek.....	10
Gambar 8 Laju Verifikasi SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali.....	13
Gambar 9 Laju Tindaklanjut SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali.....	14

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak lain merupakan hak dasar warga negara dan juga kepentingan umum sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan sosial, menciptakan keadilan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah menyediakan akses layanan pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, selama ini pengelolaan pengaduan pelayanan publik dinilai masih kurang efektif karena masing-masing organisasi penyelenggara masih mengelola layanan pengaduan secara terpisah tidak terintegrasi sehingga banyak terjadi duplikasi aduan, tidak tepat substansi bahkan aduan tidak tertangani. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membentuk saluran pengaduan satu pintu yang terintegrasi secara nasional yaitu SP4N-LAPOR!. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) merupakan sistem pengelolaan pengaduan satu pintu yang terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah secara nasional, mudah diakses, dan responsif bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan atau kebingungan mencari instansi yang dituju dalam menyampaikan aduan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Bali sekaligus implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Bali ikut menerapkan aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai sarana dalam menerima pengaduan pelayanan publik dari masyarakat. Wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam penerapan kanal aduan SP4N-LAPOR! dengan membentuk tim pengelolaan pengaduan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 310/03-E/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sampai saat ini kanal aduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali, dari perspektif masyarakat sudah mulai dikenal dan dimanfaatkan sebagai sarana aduan resmi dilihat dari jumlah aduan masuk yang cenderung meningkat serta diiringi dengan sosialisasi yang dilakukan secara offline maupun media online.

1.2 Dasar Hukum

Berbagai peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 817/02-B/HK/2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021-2024.
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 310/03-E/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Tujuan

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Keberadaan SP4N-LAPOR! bertujuan membantu penyelenggara pelayanan publik dalam mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai berikut :

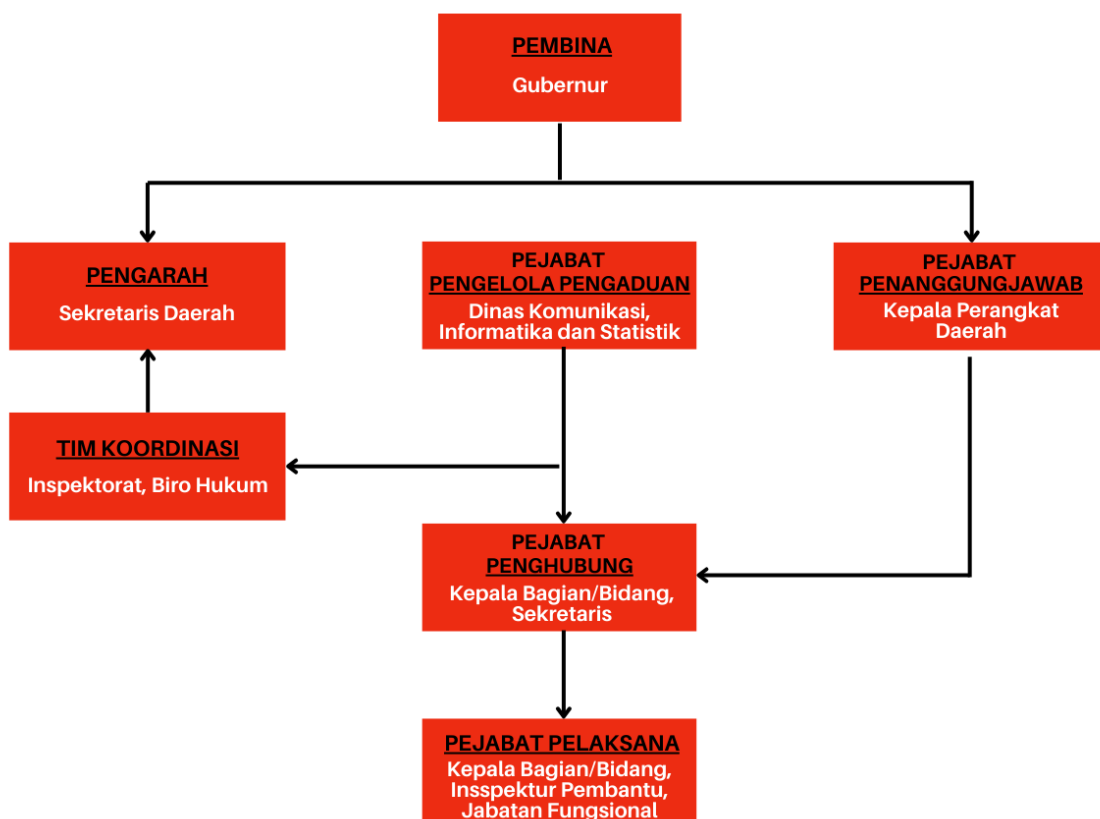
1. Sebagai tolak ukur kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik dari segi kecepatan, kepuasan dan ketepatan substansi aduan.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara dimasa datang berdasarkan jumlah aduan yang masuk dan klasifikasi aduan terbanyak.

1.4 Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengaduan

Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Pemerintah Provinsi Bali mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1.4.1 Struktur Kelembagaan

Pemerintah Provinsi Bali membentuk tim koordinasi pengelola layanan pengaduan SP4N-LAPOR! yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 310/03-E/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan gambaran sebagai berikut :



Gambar 1 Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Aduan SP4N-LAPOR!
Pemerintah Provinsi Bali

1.4.2 Saluran Pengaduan

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, SP4N-LAPOR! dirancang sebagai kanal pengaduan terintegrasi satu pintu yang dipastikan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, kanal SP4N-LAPOR! terintegrasi dengan berbagai platform yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan aduan diantaranya : **website baliprov.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), X @lapor1708 serta aplikasi lapor mobile (Android dan IOS).** Nantinya seluruh aduan yang masuk melalui platform ini ujungnya akan bermuara menjadi satu di kanal SP4N-LAPOR!.



Gambar 2 Kanal Aduan SP4N-LAPOR!

Selain platform integrasi yang sudah disediakan oleh penyelenggara SP4N-LAPOR! di atas, Pemerintah Provinsi Bali juga menerima aduan dari masyarakat melalui beberapa layanan diantaranya :

1. Email PPID Pemerintah Provinsi Bali (ppid@baliprov.go.id).
2. Sosial Media Pemerintah Provinsi Bali yaitu Facebook (Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali) dan Instagram (@pemprov_bali, @diskominfos_bali).
3. Tatap muka dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7, Denpasar-Bali 80235.

PENANGANAN PENGADUAN SP4N-LAPOR!

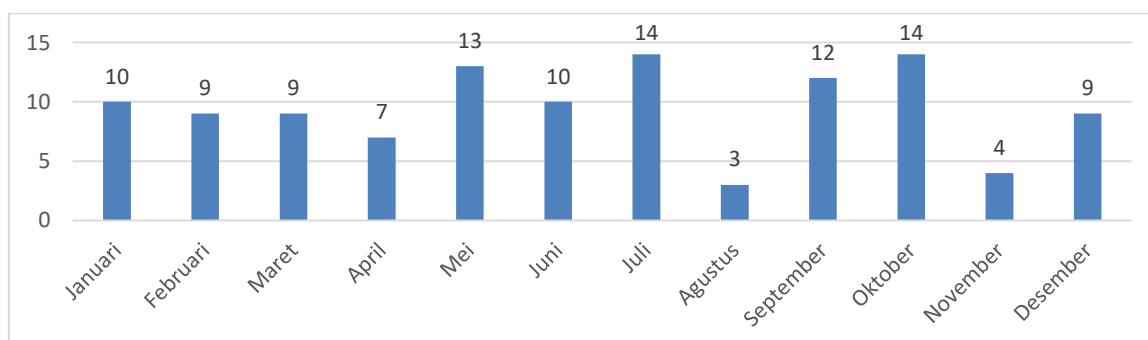
2.1 Rekapitulasi Jumlah Aduan

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali sepanjang Tahun 2024 sebanyak 153 aduan dengan rincian aduan yang sudah terselesaikan sebanyak 115 aduan, aduan yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 9 aduan, aduan yang ditunda karena kurangnya kelengkapan informasi sebanyak 15 aduan dan aduan yang diarsipkan karena laporan berulang atau tidak mendapat respon kembali dari pengadu sebanyak 14 aduan. Data digambarkan pada tabel berikut :

KETERANGAN	JUMLAH
Total Aduan	153
Belum Ditindaklanjuti	0
Dalam Proses	9
Selesai	115
Ditunda	15
Diarsipkan	14

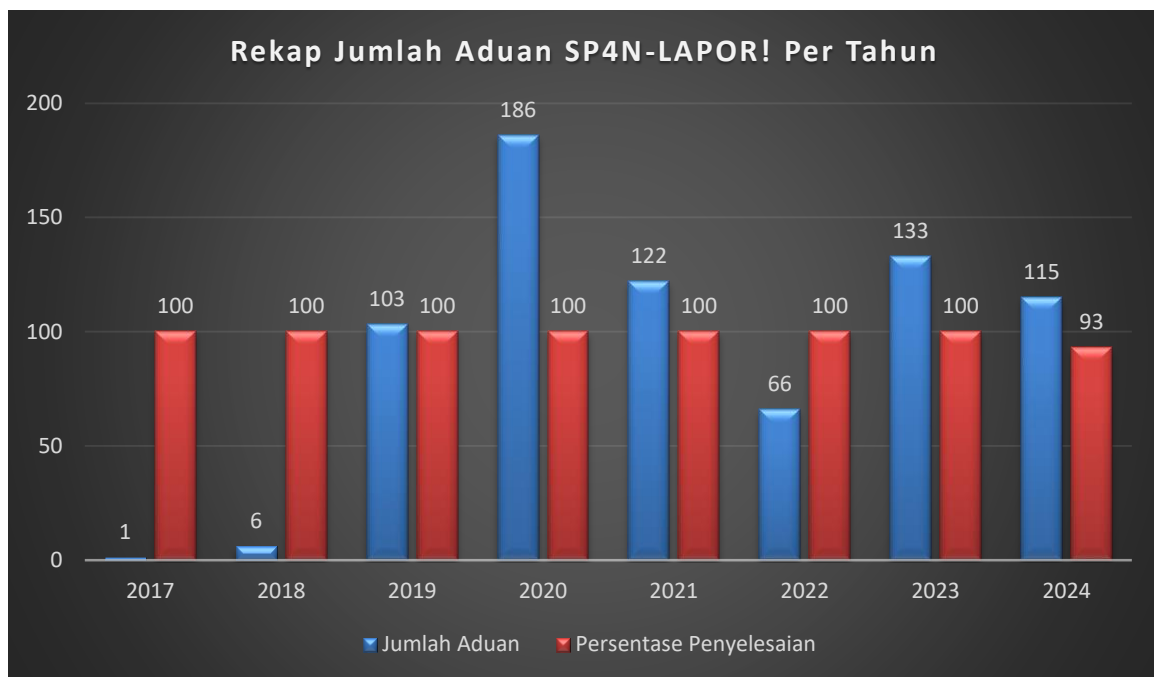
Tabel 1 Rekapitulasi Pengaduan SP4N-LAPOR! Per Desember 2024

Persentase penyelesaian aduan di tahun 2024 hampir mencapai 93%. Hal ini dikarenakan beberapa aduan yang baru masuk di minggu akhir tahun serta proses penyelesaiannya diperlukan tindakan pemeriksaan sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jumlah aduan yang masuk di Pemerintah Provinsi Bali rata-rata 8 s/d 10 aduan tiap bulannya bisa dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 3 Jumlah Rata-rata Pengaduan SP4N-LAPOR! Tiap Bulan Per Desember 2024

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat persentase penyelesaian aduan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Bali selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani pengaduan yang disampaikan masyarakat demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sendiri. Berikut ini merupakan data rekapitulasi jumlah aduan yang masuk melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali dari tahun ke tahun yang disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 4 Grafik Rekap Jumlah Aduan SP4N-LAPOR! Tiap Tahun Per Desember 2024
(Sumber : website baliprov.lapor.go.id)

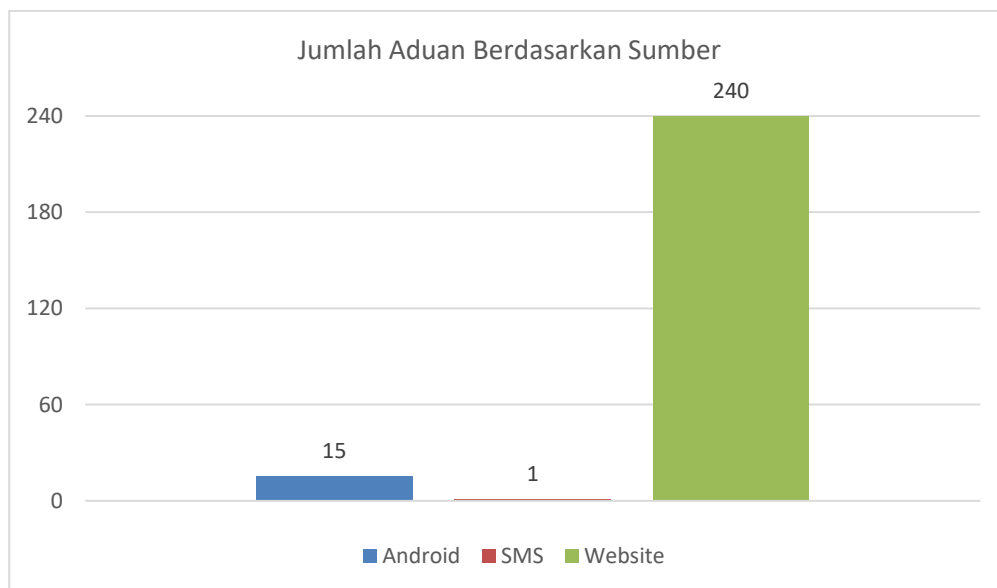
Dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah aduan yang masuk pada kanal pengaduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2024 sendiri sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini juga dikarenakan pada tahun 2024 kanal website baliprov.lapor.go.id sering mengalami gangguan pada server pusat data yang mengakibatkan website *offline* tidak bisa diakses baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri sehingga mempengaruhi jumlah aduan yang diterima.

2.2 Klasifikasi Aduan

Pengklasifikasian aduan dapat membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan di masa datang guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi permasalahan serta isu-isu yang ada di masyarakat terkait pelayanan publik sehingga pemerintah dapat fokus menentukan layanan apa yang harus dievaluasi dan ditingkatkan kembali kualitasnya. Berikut ini merupakan data klasifikasi aduan sepanjang Tahun 2024 yang ditarik dari menu statistik pada kanal SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali per Desember 2024 dan disajikan dalam bentuk grafik.

2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Sumber Aduan

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! menyediakan berbagai platform untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan. Berikut ini merupakan rekap jumlah banyak aduan berdasarkan sumber platform yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan aduan sepanjang tahun 2024.



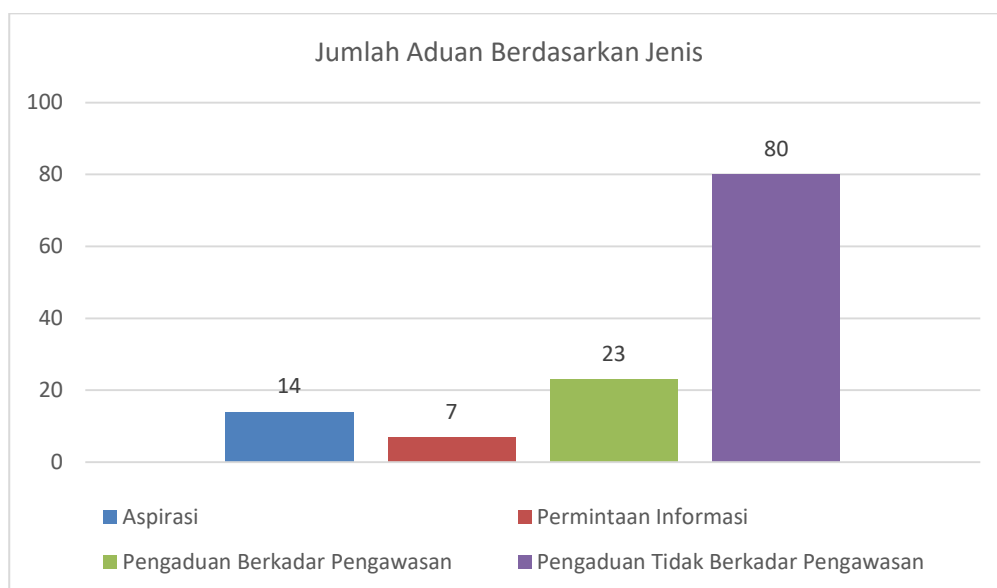
Gambar 5 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Sumber

Jumlah aduan yang masuk lebih banyak dari platform website berdasarkan data pada grafik di atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Bali lebih nyaman mengakses website dalam menyampaikan aduan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali kedepan harus lebih fokus pada pengelolaan website

baliprov.lapor.go.id terutama koordinasi dengan pemerintah pusat terkait server pusat data SP4N-LAPOR! agar tidak lagi sering mengalami *web down* sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat.

2.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Aduan

Pengaduan dari masyarakat dikelompokkan kedalam beberapa jenis aduan untuk menentukan langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti aduan. Berikut ini merupakan rekap jumlah banyak aduan berdasarkan jenis-jenis aduan sepanjang tahun 2024.



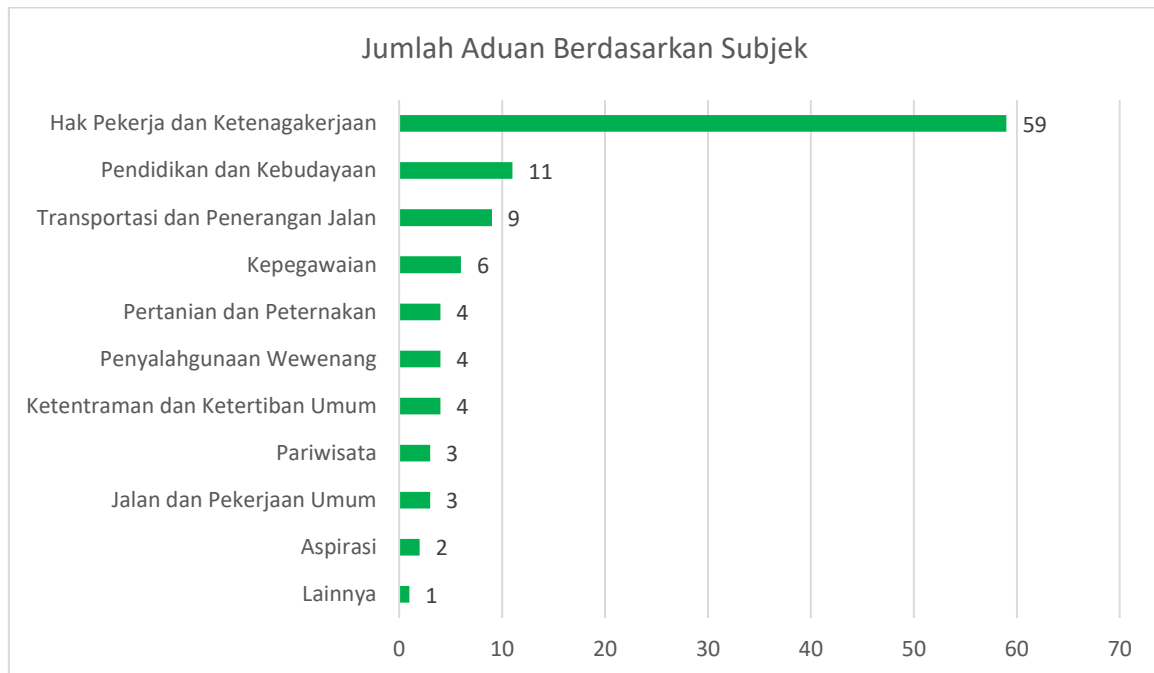
Gambar 6 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Jenis

Jumlah aduan dengan kategori jenis Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan merupakan jenis aduan terbanyak yang masuk di Pemerintah Provinsi Bali dengan total 80 aduan. Namun, aduan dengan jenis Pengaduan Berkadar Pengawasan juga berjumlah cukup banyak yaitu sebanyak 23 aduan yang berarti Pemerintah Provinsi Bali harus lebih meningkatkan lagi kegiatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak lagi ada laporan terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah yang sampai di masyarakat.

2.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Subjek Aduan

Subjek aduan diperlukan untuk mengelompokkan permasalahan pelayanan publik yang paling banyak terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat. Berikut ini

merupakan rekap jumlah banyak aduan berdasarkan subjek aduan sepanjang tahun 2024.



Gambar 7 Grafik Rekap Jumlah Aduan Berdasarkan Subjek

Jumlah aduan dengan subjek terkait Hak Pekerja dan Ketenagakerjaan dengan total aduan sebanyak 51 aduan hampir mendominasi 44% dari total seluruh aduan yang masuk di Pemerintah Provinsi Bali sesuai grafik di atas. Hal ini menunjukkan bahwa isu dan permasalahan terkait ketenagakerjaan cukup banyak terjadi di wilayah Provinsi Bali diantaranya gaji yang tidak dibayarkan, hak pekerja seperti tunjangan yang tidak diberikan, aturan perusahaan yang semena-mena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi fokus, terdapat isu lainnya seperti layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, layanan transportasi publik dan lampu penerangan jalan, kepegawaian, bibit ternak, penyalahgunaan wewenang, kebisingan oleh club di daerah wisata yang mengganggu ketentraman sekitar, kondisi jalan yang rusak dan permasalahan lainnya.

2.2.4 Klasifikasi Berdasarkan Unit Instansi

Pengaduan yang masuk di Pemerintah Provinsi Bali hampir seluruhnya ditindaklanjuti oleh unit instansi dibawahnya dimana yang dimaksud adalah

Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidangnya masing-masing. Berikut ini rekap jumlah banyak aduan yang ditindaklanjuti unit instansi sepanjang tahun 2024.

No	Unit Kerja	Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	59
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	11
3	Dinas Perhubungan	9
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6
5	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4
6	Inspektorat Daerah	4
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4
8	Dinas Pariwisata	3
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
10	Biro Organisasi	2
11	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2
15	Badan Pendapatan Daerah	1
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
17	Biro Hukum	1
18	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
19	Dinas Kebudayaan	1
20	Dinas Kesehatan	1
21	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
23	Rumah Sakit Jiwa	1
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0

26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0
27	Badan Penghubung	0
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0
29	Biro Pengadaan Barang / Jasa dan Perekonomian	0
30	Biro Umum dan Protokol	0
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	0
32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0
34	Sekretariat DPRD	0
35	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali	0

Tabel 2 Rekap Jumlah Pengaduan Berdasarkan Unit Instansi

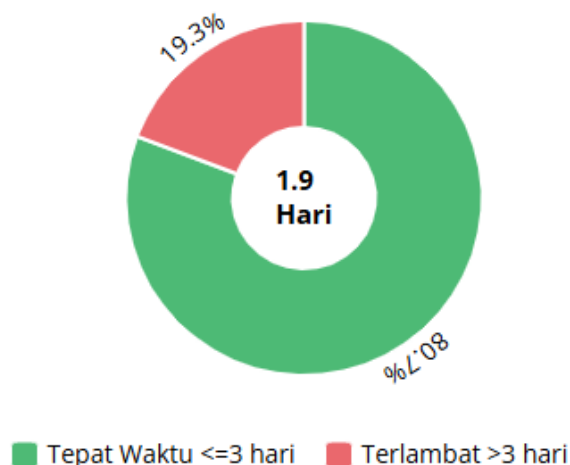
Seperti permasalahan subjek sebelumnya yaitu hal ketenagakerjaan, jumlah aduan terbanyak diterima oleh unit instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini tentunya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Bali kedepannya untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral dengan memfasilitasi sarana prasarana maupun sumber daya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait hal ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam proses tindaklanjutnya.

2.3 Laju Verifikasi dan Tindaklanjut Aduan

Salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pengelolaan layanan pengaduan SP4N-LAPOR! yaitu kecepatan instansi/lembaga dalam memproses setiap aduan yang masuk dari masyarakat. Hasil yang dicapai akan berbanding lurus dimana semakin cepat aduan diproses maka respon kepuasan masyarakat terhadap kanal pengaduan SP4N-LAPOR! akan semakin meningkat sehingga tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui SP4N-LAPOR! dapat tercapai. Pada kanal SP4N-LAPOR!, kecepatan memproses aduan dibedakan menjadi dua yaitu Laju Verifikasi dan Laju Tindaklanjut.

Laju Verifikasi adalah kecepatan instansi/lembaga pada tahap verifikasi aduan semenjak aduan diterima meliputi pengecekan substansi aduan serta kelengkapan informasi aduan. Berikut ini merupakan hasil laju verifikasi Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.

Laju Verifikasi

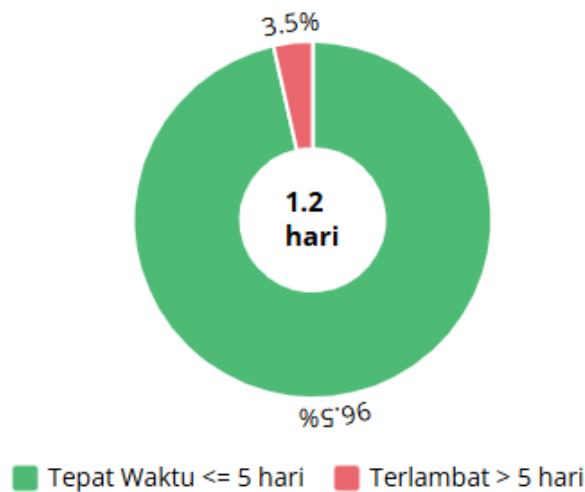


Gambar 8 Laju Verifikasi SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

Dapat dilihat pada gambar di atas, hasil rata-rata kecepatan laju verifikasi Pemerintah Provinsi Bali sepanjang tahun 2024 yaitu 1,9 hari dari batas waktu yang ditetapkan maksimal 3 hari. Persentase aduan yang diverifikasi tepat waktu kurang dari 3 hari yaitu 80,7% dengan jumlah aduan sebanyak 92 aduan sedangkan persentase aduan yang diverifikasi terlambat melebihi batas waktu 3 hari yaitu 19,3% dengan jumlah aduan sebanyak 22 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unit instansi Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi setiap aduan yang diterima sudah baik tetapi masih perlu ditingkatkan kembali kedepan agar tidak ada lagi aduan yang terverifikasi lebih dari batas waktu 3 hari.

Laju Tindaklanjut adalah kecepatan instansi/lembaga pada tahap menindaklanjuti aduan semenjak aduan didisposisikan berupa tanggapan dari instansi/lembaga yang berisikan jawaban atas permasalahan yang disampaikan dalam aduan. Berikut ini merupakan hasil laju tindaklanjut Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.

Laju Tindak Lanjut



Gambar 9 Laju Tindaklanjut SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

Dapat dilihat pada gambar di atas, hasil rata-rata kecepatan laju tindaklanjut Pemerintah Provinsi Bali sepanjang tahun 2024 yaitu 1,2 hari dari batas waktu yang ditetapkan maksimal 5 hari untuk aduan berjenis aspirasi/permintaan informasi, 14 hari untuk aduan tidak berkadar pengawasan dan 60 hari untuk aduan berkadar pengawasan. Persentase aduan yang ditindaklanjuti tepat waktu kurang dari 5 hari yaitu 96,5% dengan jumlah aduan sebanyak 110 aduan sedangkan persentase aduan yang ditindaklanjuti terlambat melebihi batas waktu 5 hari yaitu 3,5% dengan jumlah aduan sebanyak 4 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unit instansi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti setiap aduan yang diterima sudah cepat dan sangat baik.

2.4 Kegiatan yang Dilaksanakan

Sebagai upaya dalam mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR!, Pemerintah Provinsi Bali melakukan beberapa strategi guna mengoptimalkan sinergi antara pengelola dengan unit instansi perangkat daerah yang dilaksanakan secara berkala tiap tahunnya. Adapun pelaksanaan strategi ini berupa kegiatan diantaranya :

2.4.1 Monitoring dan Evaluasi

Dalam memastikan setiap aduan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, Pemerintah Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelesaian aduan oleh unit instansi perangkat daerah. Bentuk monitoring dan evaluasi aduan yang dilakukan berupa :

1. Membentuk Whatsapp Group SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Bali sebagai wadah koordinasi terkait disposisi aduan serta kendala-kendala dalam penyelesaian aduan.
2. Membuat Laporan Rekap Tindaklanjuti Aduan yang masuk pada SP4N-LAPOR! dalam periode Mingguan dan Bulanan.



REKAP DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN MINGGUAN YANG MASUK MELALUI SP4N-LAPOR! (PER 23 - 29 DESEMBER 2024)

Bersama ini disampaikan rekap laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal website <https://baliprov.lapor.go.id/>, yang diterima Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kondisi sampai dengan Tanggal 29 Desember 2024, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
750	0	0	7	743

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh Pejabat Penghubung (OPD), sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BEUM	ELM PROSES	
1	Wisata Atv Di Singapadu Kaler Menggunakan Jalan Umum #8425386	Dinas Pariwisata Provinsi Bali		✓	Status : Pengaduan sudah ditindaklanjuti



NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 1 Oktober 2024
Nomor : B.14.000/9022/IKPID KOMINFOS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 September s.d. 30 September 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal website [www.baliprov.lapor.go.id](https://baliprov.lapor.go.id/), yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 September s.d. 30 September 2024, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
723	1	0	12	710

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu Komitmen Pimpinan dimana Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengarah dalam struktur tim koordinasi ikut terlibat langsung mengevaluasi Laporan Rekap Tindaklanjuti Aduan SP4N-LAPOR! periode Mingguan yang dikirimkan oleh Pejabat Pengelola Pengaduan yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.



Terhadap Laporan Rekap Tindaklanjuti Aduan SP4N-LAPOR! periode Mingguan, Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi mengundang Kepala Perangkat Daerah bersangkutan jika didapat aduan yang belum ditindaklanjuti atau aduan yang memerlukan langkah khusus dalam penyelesaiannya.

2.4.2 Bimbingan Teknis

Kemampuan kompetensi pengelola layanan pengaduan SP4N-LAPOR! menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas tindaklanjuti aduan yang cepat, tepat dan efektif. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi para Pejabat Penghubung dan Operator Layanan SP4N-LAPOR! merupakan salah satu cara agar setiap unit instansi memiliki kapasitas aparatur pengelola aduan yang profesional.

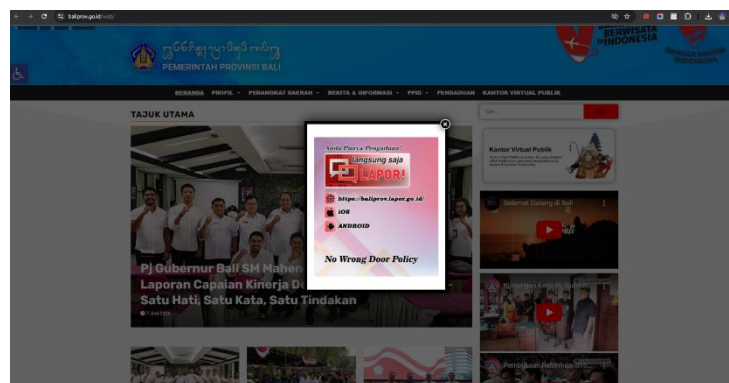


Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N-LAPOR! pada tanggal 13 Juni 2024 dengan mengundang para Pejabat Penghubung dan Operator Pengelola Pengaduan di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui bimbingan

teknis ini diharapkan para peserta semakin memahami mekanisme dan teknis pengelolaan aduan pada kanal SP4N-LAPOR! yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, bimtek ini sekaligus menjadi wadah bertukar pikiran terkait kendala, isu-isu serta permasalahan yang ditemui para peserta terkait pengelolaan aduan yang sudah berjalan.

2.4.3 Sosialisasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan kanal pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR!. Agar kanal pengaduan dapat diketahui oleh masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi penyebaran informasi terkait kanal pengaduan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat luas secara bersama oleh seluruh pemerintah.



Bersamaan dengan penyelenggaraan Festival Pameran Pembangunan, Pemerintah Provinsi Bali ikut mensosialisasikan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! pada acara Talk Show di booth Pojok Literasi Digital dengan peserta masyarakat dan siswa sekolah yang berkunjung ke acara festival. Pada acara ini disampaikan

secara detail mulai dari alur membuat aduan pada kanal SP4N-LAPOR! sampai mekanisme pengelolaan pengaduan agar masyarakat mengetahui bagaimana sistem bekerja sampai aduan diterima oleh instansi yang dituju oleh masyarakat.

Selain melalui kegiatan langsung, Pemerintah Provinsi Bali juga gencar melakukan sosialisasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR! pada media sosial dan media berita serta website resmi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan strategi penyebaran informasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR! melalui fasilitas pop up yang muncul pada landing page login free wifi Bali Smart Island milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang tersebar di 2.303 titik di seluruh wilayah pulau Bali seperti pada Desa Adat, Puskesmas, Objek Wisata dan Fasilitas Umum.



Pemerintah Provinsi Bali juga ikut aktif dalam kegiatan sosialisasi SP4N-LAPOR! yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara SP4N-LAPOR! yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara Lapor Goes to Campus yang diadakan di Universitas Udayana dengan menghadirkan ribuan mahasiswa sebagai target edukasi layanan pengaduan SP4N-LAPOR!. Diharapkan mahasiswa sebagai generasi yang kritis ikut aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui kanal SP4N-LAPOR!, Pemerintah Provinsi Bali menemui beberapa hambatan yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat persentase dari penyelesaian aduan diantaranya :

KENDALA INTERNAL

- Admin instansi yang belum cukup tanggap dalam menindaklanjuti aduan dengan respon kurang cepat.
- Pergantian admin instansi akibat mutasi pegawai sehingga diperlukan lagi pemahaman ulang mengenai mekanisme dan teknis pengelolaan aduan.
- Admin pengelola yang merangkap banyak tugas sehingga tidak bisa fokus dalam monitoring proses penyelesaian aduan.

KENDALA EKSTERNAL

- Sistem SP4N-LAPOR! cukup sering mengalami down pada server pusat data sehingga sulit untuk diakses.
- Tidak adanya fitur notifikasi pada sisi Pengadu sehingga banyak aduan yang tertutup otomatis karena countdown waktu sudah habis yang mana masih menunggu tanggapan balik dari Pengadu dan ketika Pengadu mengetahui aduan sudah tertutup Pengadu memberi respon kurang baik.
- Kurangnya pemahaman Pengadu dalam memberi feedback atas aduan yang telah selesai ditanggapi serta menutup laporan.
- Terdapat aduan yang perlu melibatkan beberapa instansi sehingga kesulitan untuk disposisi aduan terkendala fitur pada sistem dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Tampilan dashboard dan statistik laporan yang sedikit membingungkan dengan hasil data yang ditampilkan kadang tidak sesuai.
- Belum adanya fitur dalam membantu kaum penyandang disabilitas.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendala dan permasalahan yang ditemukan sepanjang pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! tahun 2024 di Pemerintah Provinsi Bali, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada tahun 2025 kedepan diantaranya :

TINDAKLANJUT DARI KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL

1. Meningkatkan koordinasi antar pengelola layanan pengaduan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis SP4N-LAPOR! yang direncanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Memperkuat dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan intruksi dari Gubernur.
3. Menjalin kerjasama lintas lembaga dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi secara online melalui penyebaran informasi pada sosial media dan media resmi pemerintah maupun secara offline melalui kegiatan-kegiatan literasi.

REKOMENDASI KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL

1. Terhadap pengaduan rencana strategis pemerintah Provinsi Bali :
 - Sosialisasi khususnya pada hak-hak pekerja pada perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing serta program-program pendidikan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
 - Menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun SPSI tentang hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Koordinasi lebih intens tentang sosialisasi, publikasi penyediaan lowongan pekerjaan.
 - Memastikan dan membuat penataan terkait pertanggungjawaban, kewenangan serta pemeliharaan antara kepemilikan aset pusat di daerah.

3.1 Simpulan

Pejabat Pengelola Pengaduan Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan Pengaduan Pelayanan Publik secara offline dan online. Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sudah terlaksana dengan baik dan mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respons dan solusi cepat serta terpercaya, sehingga meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat dan meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Bali sebagai masukan dan saran yaitu :

1. Perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia yang cakap, inovatif, punya inisiatif serta mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan pimpinan.
2. Secara khusus pembinaan dan kompetensi Petugas Pelayanan Pengaduan yang tersertifikasi untuk kualitas kerja Tulus, Lurus berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
3. Menjalin kerjasama yang lebih komprehensif dengan Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali sebagai mitra kerja diseminasi dan edukasi SP4N-LAPOR!.
4. Melakukan pendekatan yang preventif dan mengakar ke Lembaga Desa Dinas/Adat, sebagai bentuk sosialisasi SP4N-LAPOR! pada lapisan masyarakat.

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan SP4N-LAPOR! ini disusun sebagai gambaran atas kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sepanjang tahun 2024. Selanjutnya laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan yang akan dilakukan kedepannya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Denpasar, 30 Januari 2025





NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 1 Januari 2024
Nomor : B.14.000/1018/IKP/D.KOMINFOS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Januari s.d. 31 Januari 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
758	0	0	4	754

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Pt. Archestet Real Estate #8456026 Tanggal Aduan : 13 Desember 2024 Ringkasan Aduan : Perusahaan bertindak semena-mena terhadap karyawan seperti pemecatan, terkait hak	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		✓	Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 6 hari Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	karyawan serta pengancaman . (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1hElwmDXWqarXJn1FGKpAqbf9Wp7jBovi?usp=drive_link
2	Agen Penyalur Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Secara Ilegal #8472976 Tanggal Aduan : 18 Desember 2024 Ringkasan Aduan : Mohon dicek ijin resmi perusahaan PT. Ratu Oceania Raya Bali dalam melakukan rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 1 hari Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Gp9vEWhvgDOT2pifyzLkfhSySdJjmZIQ?usp=drive_link
3	Dirut Perumda Melakukan Penyalahgunaan Wewenang #8457341 Tanggal Aduan : 7 Januari 2024 Ringkasan Aduan : Penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Utama Perumda diantaranya penggunaan aset perusahaan untuk keperluan pribadi, tindakan semena-mena terhadap karyawan, melanggar UU ketenagakerjaan terkait phk dan hak karyawan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 10 hari Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1NBFoD-kT-fzhg0uhhu9bKOLdjYhVCAe6?usp=drive_link
4	Kondisi Toilet Dan Gor Ngurah Rai Memprihatinkan #8581541 Tanggal Aduan : 24 Januari 2024 Ringkasan Aduan : Mohon dirapikan fasilitas toilet di Gor Basket Ngurah Rai Denpasar yang kondisinya memprihatinkan agar lebih nyaman dan higienis.	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 9 hari Link Bukti Dukung :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	(Selengkapnya...)				https://drive.google.com/drive/folders/1BRnQG9LXQQudbLHtocPIUiOzYgviXgNC?usp=drive_link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Pengajuan SIP # 8523121 Tanggal Aduan : 6 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Masalah Sertifikat Kompetensi tidak terbaca di Aplikasi Mall Pelayanan Publik. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
2	Rekomendasi Gubernur # 8526361 Tanggal Aduan : 7 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Permohonan informasi terkait update pengajuan proposal teknis permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
3	Gaji Tidak Dibayarkan Sudah Hampir Dua Bulan # 8467481 Tanggal Aduan : 8 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Gaji di PT. Ashoka Karya Utama Bali sudah 2 bulan tidak dibayarkan (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
4	Tidak diperbolehkan untuk libur Beker #8558436 Tanggal Aduan : 16 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Kurangnya akumulasi jatah libur bekerja di bulan Januari yang tidak diijinkan dengan alasan kurang tenaga kerja. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
5	Perihal gaji #8569136 Tanggal Aduan : 20 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Gaji karyawan tidak di bayarkan oleh perusahaan shopee express (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Sampah di Pantai Kedonganan # 8515406 Tanggal Aduan : 2 Januari 2025 Ringkasan Aduan : Mohon perhatian pemerintah terkait kondisi sampah di pantai kedonganan yang kondisinya sudah gawat. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung karena lokasi pantai berada di Kabupaten Badung.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.
NIP. 19790924 200803 1 001



Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
 Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
 2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
 Tanggal : 1 Januari 2024
 Nomor : **B.14.000/1672/IKP/D.KOMINFOS**
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : ***Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Pebruari s.d. 28 Pebruari 2024***

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
765	0	0	6	759

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Tolong Di Tindak Lanjuti Kegiatan Galian C Yang Mengakibatkan Longsor #8650746 Tanggal Aduan : 18 Februari 2025 Ringkasan Aduan :	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 1 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	Mohon ditindak kegiatan galian c paras ilegal yang sudah berlangsung selama 3 bulan di desa kelating, kerambitan, tabanan. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1aQkB-s-99QJCG1X5hzvGx3LthAtGf5qv?usp=drive_link
2	Penahanan Gaji Dan Paksaan Ganti Rugi Barang #8631261 Tanggal Aduan : 19 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Tindak penahanan gaji atas ganti rugi perusahaan kepada pihak outsourcing yang dilimpahkan ke karyawan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Fd8lHeHTpTRfPiIiy-l78DidOrx25wr?usp=drive_link
3	Bpjs Kis Tidak Aktif Karena Premi #8662851 Tanggal Aduan : 20 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Mohon diberikan peringatan perusahaan membiarkan BPJS KIS tidak aktif karena tidak membayar premi sehingga menghambat masa pengobatan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 3 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/10zPRDyTil4oULPq2VbalT9NZSnP07-UP?usp=drive_link
4	Mohon Bantuan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Upah Yang Tidak Dibayarkan #8668096 Tanggal Aduan : 25 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan perlindungan, upah yang tidak dibayarkan	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 6 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/10zPRDyTil4oULPq2VbalT9NZSnP07-UP?usp=drive_link

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	penuh oleh perusahaan. (Selengkapnya...)				com/drive/folders/1t7WCafuugNTpCAwL5noL-AbUxTlYrINs?usp=drive_link
5	Pelanggaran Hak Normatif Karyawan #8678946 Tanggal Aduan : 26 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Beberapa pelanggaran hak normatif karyawan oleh perusahaan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 11 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1nndo9OLpBTUzGwfU5Z881wRXNrCjCwwL?usp=drive_link
6	Bendesa Besakih Dan Komplotan Bermain Curang Pada Hibah Umum Nomor 284/03-Q/Hk/2024 Senilai 1 Miliar #8691976 Tanggal Aduan : 28 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Mohon diperiksa bendesa adat besakih terkait usulan dana hibah yang belum cair tetapi renovasi pelinggih sudah selesai dilakukan, indikasi kecurangan dana hibah tidak sesuai prosedur. (Selengkapnya...)	Inspektorat Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 9 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1iSNrv0qoZunJriwcYy7fLttCcidcu3KU?usp=drive_link

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Pembangunan Ilegal Berbahaya #8603101 Tanggal Aduan : 3 Februari 2024 Ringkasan Aduan : Pembangunan villa di pinggir jalan sepadan sungai yang diyakini tidak memiliki IMB. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kota Denpasar karena lokasi berada di wilayah Denpasar.
2	Perusakan Lingkungan Untuk Penggalian Batu Padas #8606836 Tanggal Aduan : 4 Februari 2024 Ringkasan Aduan : Penebangan pohon dan penggalian tanah untuk mengikis batu padas yang dapat merusak hutan. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Gianyar		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Gianyar karena lokasi hutan berada di luar kawasan hutan negara.
3	Tidak Ada Itikad Untuk Membayar Tagihan Sesuai Kontrak #8610941 Tanggal Aduan : 7 Februari 2024 Ringkasan Aduan : Tagihan yang tidak dibayarkan oleh sebuah usaha SPA kepada jasa konsultan yang sudah menyelesaikan pekerjaan. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena bukan hubungan ketenagakerjaan melainkan bisnis yang tidak memenuhi kewajiban.
4	STREAMING ATCS CCTV # 8668736 Tanggal Aduan : 24 Februari 2024 Ringkasan Aduan : Mohon aktifkan kembali streaming cctv beberapa titik di kabupaten kota Bali. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kota Denpasar karena lokasi dan pengecekan kondisi serta API CCTV bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
5	ODGJ mengidap pneumonia # 8684291 Tanggal Aduan : 26 Februari 2024 Ringkasan Aduan : Tidak ada kejelasan lebih lanjut dari kepala dinas dan bidang terkait pasien ODGJ yang dirawat di Dinas Sosial Pemkab Jembrana. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Jembrana		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Jembrana karena pasien berada di Dinas Sosial Pemkab Jembrana.
6	Penipuan jasa kost #8703791 Tanggal Aduan : 1 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Jasa kost tidak memberikan rekomendasi kost setelah uang jasa ditransfer. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali kasus penipuan.
7	Tamu melarikan diri dari penginapan dan tidak melakukan pembayaran #8706481 Tanggal Aduan : 2 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan mengecek tamu WNA yang kabur tidak membayarkan biaya penginapan jika keluar Bali. (Selengkapnya...)	Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi Denpasar)		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Denpasar.
8	Parkir liar #8707806 Tanggal Aduan : 2 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Mohon ditertibkan parkir tanpa karcis di depan Brush Cafe sebelah Mall Level 21. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Gaji tidak dibayar full #8609706 Tanggal Aduan : 4 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Jumlah sisa gaji yang tidak sesuai setelah dipotong pinjaman di perusahaan. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama, alamat perusahaan, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
2	PT. ACCENTUATES (SAMSUNG INDONESIA) DIVISI HHP ATAU HANDPHONE #8655436 Tanggal Aduan : 19 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Adanya KPI (Key Performance Indicator) baru yang tidak dijelaskan dari awal yang berpotensi menggantikan posisi pengadu karena point di bawah rata-rata. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap perusahaan alamat dan no telepon, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
3	Update Konten Website #8653321 Tanggal Aduan : 20 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Mohon dipelihara website pemerintah karena banyak data dan informasi yang tidak up to date untuk kepentingan warga bali baik untuk informasi maupun menjalankan usaha. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nama/alamat website yang dimaksud, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.

NIP. 19790924 200803 1 001



පිළිගිණු ආචාරිකාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත තොරතුරු තාක්ෂණ, ප්‍රකාශන හා සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
தகவல் தொடர்பு மற்றும் புள்ளிவிவர அமைச்சு (பேர்தகவல்) தமிழ்நாடு அரசு
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 8 April 2025
Nomor : **B.14.000/2860/IKP/D.KOMINFOS**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 Maret s.d 31 Maret 2025, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
780	3	0	11	769

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Pelanggaran Hak Normatif Karyawan #8678946 Tanggal Aduan : 26 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Beberapa pelanggaran hak normatif karyawan oleh	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (<i>Close by System</i>) : 7 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	perusahaan. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1ndo9OLpBTUzGwfU5Z881wRXNrCjCwwL?usp=drive_link
2	Pengaduan Gaji Yang Belum Dibayar #8714146 Tanggal Aduan : 3 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan selama 2 bulan dan belum ada solusi yang diberikan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1rFse_GDTmi-OtUhXJ6IJQQHdLPoXqXYs?usp=drive_link
3	Laporan Pelanggaran Hak Pekerja #8761556 Tanggal Aduan : 12 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan diantaranya jam kerja berlebihan, gaji tidak sesuai ump, kontrak kerja tidak transparan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindakanlanjuti Instansi : 6 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Wh9X6TvzBDXxF6fILmJAZrBOB6Y03Zm?usp=drive_link
4	Hak Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Selama 4 Tahun #8742676 Tanggal Aduan : 14 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Hak yang belum dibayarkan oleh owner perusahaan selama 4 tahun walau syarat penyelesaian hak perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 3 hari Link Bukti Dukung :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	sudah dilakukan. (Selengkapnya...)				https://drive.google.com/drive/folders/1LTQTxEwGlgchnpCzEQ6QexnhfT6xKEf?usp=drive_link
5	Phk Sepihak Oleh Perusahaan #8773351 Tanggal Aduan : 14 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan Disnaker Provinsi Bali terkait permasalahan phk sepihak, sudah melapor ke Disnaker Pemkab Badung tetapi Mediator tidak mau mendampingi perundingan bipartit. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 3 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/19h14zkVGfkrxNidIGiHei6soCY5zR2zb?usp=drive_link
6	Scam business / Russian operated #8785316 Tanggal Aduan : 16 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan restoran dengan kualitas makanan yang tidak enak melakukan pemalsuan review pada aplikasi online, mohon diinvestigasi. (Selengkapnya...)	Dinas Pariwisata Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 3 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1n81AxKfDY06JUXamiJgl7u4snwltX7LY?usp=drive_link
7	Tidak Ada Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Karyawan (Thr) #8787026 Tanggal Aduan : 17 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya kepada karyawan Daily Worker yang sudah bekerja setahun.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 3 hari Link Bukti Dukung :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	(Selengkapnya...)				https://drive.google.com/drive/folders/1isVBmp2Jp0ui4S5Efy6QcqXnEy4gs-cK?usp=drive_link
8	Online Shop Penipu Yang Nyuruh Bayar 2 Kali Lipat Lalu Uangnya Dibawa Kabur Begitu Saja #8784561 Tanggal Aduan : 17 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan online shop pembelian tas preloved, setelah melakukan transfer uang tidak bisa dihubungi. (Selengkapnya...)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1tTB6TxjEQe4vUui7EGJBhrTBCPFLEKHg?usp=drive_link
9	Perusahaan Tidak Sesuai Sop Dalam Memberi Gaji #8798636 Tanggal Aduan : 21 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon ditindak dan diberikan sanksi perusahaan tidak memberikan slip gaji ke karyawan dan tidak ada tunjangan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 6 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1le6Ux3X8ddbdAqkbDUOU84jhf3gNHu6M?usp=drive_link
10	Penanganan Pohon Tumbang #8810546 Tanggal Aduan : 22 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Masukan untuk menebang pohon-pohon besar dan rawan tumbang mengingat kejadian terbaru pohon besar menimpa kendaraan di daerah Kuta.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 1 hari Link Bukti Dukung :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	(Selengkapnya...)				https://drive.google.com/drive/folders/1f mEgNW9fcGFexmM GjYg_HupeMDXF18 PH?usp=drive_link
11	Reporting Unhygienic Restaurant #8839881 Tanggal Aduan : 30 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Restoran tidak higienis, banyak tikus bersebrangan dari dapur yang kotor, mohon diperhatikan karena dapat menyebabkan penyakit dari hewan. (Selengkapnya...)	Dinas Pariwisata Provinsi Bali		✓	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 14 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1 Qs_rm6KFh1eVCvfs PU8Yt6C0enCJuO2d ?usp=drive_link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1.	Pertanyaan terkait Bapertarum-PNS #8720846 Tanggal Aduan : 6 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Pertanyaan apakah potongan Bapertarum PNS bisa dicairkan. (Selengkapnya...)	-		✓	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap tahun pensiun, instansi pemerintah, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
2.	Mohon pemerintah tindak lanjutin kasus UMR pada BPO gearinc tidak sesuai dengan UUD dan ijin cuti hak karyawan dipersulit #8738751 Tanggal Aduan : 11 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon ditindaklanjuti kasus UMR	-		✓	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi, kronologis yang jelas, serta bukti pendukung lainnya

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	yang tidak sesuai dan ijin cuti yang dipersulit. (Selengkapnya...)				
3.	Peracunan Anjing di wilayah perumahan #8738996 Tanggal Aduan : 11 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Terjadi peracunan anjing sampai menyebabkan kematian, mohon ditindaklanjuti agar tidak lagi ada peracunan anjing oleh oknum tidak bertanggungjawab. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait lokasi kejadian, kronologis yang jelas, serta bukti pendukung lainnya
4.	THR #8776186 Tanggal Aduan : 15 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon sidak perusahaan tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya sudah selama 2 tahun. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi kejadian, kronologis yang jelas, serta bukti pendukung lainnya
5.	Pembayaran Gaji yang di Cicil tidak Sesuai Peraturan dan Kontrak Kerja #8784146 Tanggal Aduan : 16 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Keterlambatan pembayaran sisa gaji karyawan (allowance/service) yang sudah lewat 16 hari . (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi kejadian, kronologis yang jelas, serta bukti pendukung lainnya
6.	Pengaduan Sisitem Gaji #8798346 Tanggal Aduan : 21 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon sidak perusahaan yang tidak mau dan tidak pernah memberikan slip gaji kepada karyawan. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi kejadian, kronologis yang jelas, serta bukti pendukung lainnya

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
6.	Penipuan uang #8824561 Tanggal Aduan : 26 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan oleh Online Shop sylesage. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait OL shop, lokasi kejadian, kronologis tidak jelas, serta bukti pendukung lainnya
7.	Melanggar Permenaker No. 5 tahun 2018 #8826816 Tanggal Aduan : 27 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Tidak ada fasilitas kamar mandi di tempat kerja. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait tempat kerja yang dimaksud, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
8.	Cek NIK #8820316 Tanggal Aduan : 27 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan cek NIK yang belum valid setelah adanya perubahan data. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait nomor NIK yang dimaksud, lokasi, kronologis, serta bukti pendukung lainnya

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1.	Penipuan jasa kost #8703791 Tanggal Aduan : 1 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Jasa kost tidak memberikan rekomendasi kost setelah uang jasa ditransfer. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali kasus penipuan.
2.	Tamu melarikan diri dari penginapan dan tidak melakukan pembayaran #8706481	Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Tanggal Aduan : 2 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan mengecek tamu WNA yang kabur tidak membayar biaya penginapan jika keluar Bali. (Selengkapnya...)	Denpasar)			Denpasar.
3.	Parkir liar #8707806 Tanggal Aduan : 2 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Mohon ditertibkan parkir tanpa karcis di depan Brush Cafe sebelah Mall Level 21. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar.
4.	Penipuan dalam transaksi Villa #8714251 Tanggal Aduan : 3 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Penipuan oleh oknum yang memasarkan villa dengan harga sewa murah. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali kasus penipuan.
5.	WNA yang Menawarkan & Menyewakan Villa secara pribadi bukan melalui PT/PMA #8685816 Tanggal Aduan : 4 Maret 2024 Ringkasan Aduan : Mohon ditindak secepatnya WNA Rusia yang melanggar UU Keimigrasian memasarkan villa ke rekening pribadi untuk menghindari pajak. (Selengkapnya...)	Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi Denpasar)		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Denpasar.
6.	HAK UPAH KARYAWAN YANG TIDAK DIBERIKAN #8601621 Tanggal Aduan : 4 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Gaji bulan terakhir yang tidak dibayarkan setelah resign serta	Pemerintah Kota Denpasar		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kota Denpasar terkait perselisihan hak.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	adanya pencemaran nama baik. (Selengkapnya...)				
7.	Pohon Membahayakan #8703951 Tanggal Aduan : 6 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Adanya pohon rindang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Blahbatuh Gianyar. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Gianyar		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Gianyar.
8.	Tidak memberikan Kompensasi PKWT #8703681 Tanggal Aduan : 7 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan tidak memberikan hak kompensasi kepada karyawan yang sudah resign. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung terkait perselisihan hak setelah hubungan kerja berakhir.
9.	Disuruh HR perusahaan untuk membuat surat resign karena menolak mutasi kerja #8733641 Tanggal Aduan : 7 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Pertanyaan terkait status pemberhentian kerja, pemutusan kerja secara sepihak dan hak uang pesangon. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung terkait perselisihan hak setelah diberhentikan kerja.
10	PHK Sepihak oleh Perusahaan #8734881 Tanggal Aduan : 9 Maret 2025 Ringkasan Aduan : PHK sepihak oleh perusahaan sebelum masa kontrak habis dan tanpa diberikan pesangon. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung terkait phk sepihak dan perselisihan hak.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
11.	Farmanina Hair & Aesthetic Clinic Bali #8738181 Tanggal Aduan : 10 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Komplain hasil treatment transplantasi rambut yang tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian, mohon diinvestigasi praktek klinik kecantikan ini. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kota Denpasar karena ijin praktek klinik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
12.	Urgent Complaint Regarding Inappropriate Conduct by Tourist Lisa Legg (TikTok: @stalkedbythefeds) #8755241 Tanggal Aduan : 12 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon investigasi WNA yang membuat konten tiktok menyebar misinformasi yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan dapat merusak reputasi Bali sebagai tujuan wisata. (Selengkapnya...)	Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi Wilayah Bali)		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Bali terkait penyelidikan WNA.
13.	Tindak WNA dengan izin kerja illegal #8750531 Tanggal Aduan : 13 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Dugaan WNA yang tidak memiliki ijin tinggal dan berbisnis ilegal di Bali, mohon di cek dan ditindak apakah memiliki ijin tinggal dan visa investor. (Selengkapnya...)	Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi Wilayah Bali)		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Bali terkait penyelidikan WNA.
14.	Laporan Penipuan dan Penyalahgunaan data pribadi #8780866 Tanggal Aduan : 16 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan dan informasi penipuan melalui Whatsapp yang	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali terkait kasus penipuan.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	berkedok rental motor dan indikasi penyalahgunaan data pribadi. (Selengkapnya...)				
15.	Penipuan beli kamera di instagram #8786361 Tanggal Aduan : 16 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan polisi untuk kasus penipuan pembelian kamera di Instagram. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali terkait kasus penipuan.
16.	Kebersihan Lingkungan Dan Penanggulangan Sampah #8813401 Tanggal Aduan : 23 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon atensi pemerintah daerah Jimbaran Kampus UNUD untuk mengangkut sampah agar warga tidak membakar di rumah sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung karena lokasi berada di wilayah Badung.
17.	Laporan Pengaduan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggunaan KTP Secara Tidak Sah! #8831276 Tanggal Aduan : 27 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Tindak pidana penipuan pembelian handphone oleh iklan di forum jual beli Facebook dengan menggunakan KTP seseorang sebagai jaminan . (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena kasus tindak pidana penipuan merupakan ranah kepolisian.
18.	Permohonan informasi NIK #8840681 Tanggal Aduan : 31 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan cek NIK untuk	Pemerintah Kota Medan		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kota Medan karena

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	membuat KTP lahir di Medan. (Selengkapnya...)				pelapor lahir di Kota Medan.

Pengaduan yang **Diarsipkan** karena merupakan laporan berulang yang sudah pernah ditindak lanjuti sebelumnya, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Hak Pegawai Ditunda untuk Diberikan # 8763651 Tanggal Aduan : 13 Maret 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan Perumda Kerthi Bali Santhi belum membayarkan hak ex karyawan seperti kompensasi, bpjs dan gaji bulan terakhir. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Laporan berulang diajukan kembali sebelumnya sudah pernah ditindaklanjuti oleh Disnaker pada aduan nomor #8457341 dengan menerbitkan Nota Riksa 1
	Tindak Lanjut PHK Sepihak Oleh Perusahaan #8799401 Tanggal Aduan : 20 Maret 2025 Ringkasan Aduan : PHK sepihak oleh perusahaan sudah lapor tetapi mediator Disnaker Badung tidak mau mendampingi, mohon tripartit dilakukan lewat video call terkait keselamatan jiwa . (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Laporan berulang diajukan kembali aduan sebelumnya masih dalam proses tindaklanjut oleh Disnaker pada aduan nomor #8773351

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.
NIP. 19790924 200803 1 001



NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 5 Mei 2025
Nomor : **B.14.000/3469/IKP/D.KOMINFOS**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 April s.d. 30 April 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 April s.d 30 April 2025, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
795	0	0	5	790

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Pelanggaran Hak Normatif Karyawan #8678946 Tanggal Aduan : 26 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Beberapa pelanggaran hak normatif karyawan oleh	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 7 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	perusahaan. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1nndo9OLpBTUzGwfU5Z881wRXNrCjCwwL?usp=drive_link
2	Streaming Cctv Banyak Yang Off #8877276 Tanggal Aduan : 15 April 2025 Ringkasan Aduan : Tolong dihidupkan kembali beberapa CCTV dalam kondisi off pada website balisatudata. (Selengkapnya...)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 10 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1jQOMAdZiPE4eLDxKUk_0KDKH7GWInd6X?usp=drive_link
3	Informasi Terkait Membawa Hewan Dari Jakarta Ke Bali #8878501 Tanggal Aduan : 17 April 2025 Ringkasan Aduan : Mohon informasi persyaratan membawa hewan (kucing) dari Jakarta ke Bali. (Selengkapnya...)	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 1 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1qjAt0na3QC_ggcoFbg6oGI35NMkA1Ok3?usp=drive_link
4	Insentif Karyawan Tidak Dicairkan Selama 3 Bulan #8874436 Tanggal Aduan : 18 April 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan tidak mencairkan insentif penjualan sudah lewat 3	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu Tindaklanjut Instansi :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	bulan, mohon bantuan dan arahan. (Selengkapnya...)				9 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1YleTHT5eI74OUnd3xRYUqcr7tgVhdci?usp=drive_link
5	Pengaduan Pemotongan Gaji Dan Pph 21 #8899386 Tanggal Aduan : 25 April 2025 Ringkasan Aduan : Pelanggaran potongan gaji tidak wajar oleh perusahaan dan penerapan pinalty resign bagi karyawan tetap. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 5 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Q2wl_cG2V6Qn_x1CWsF36UxNExtDRzMo?usp=drive_link

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Penipuan online #8844761 Tanggal Aduan : 2 April 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan penjualan kamera digital pada aplikasi Instagram dan Whatsapp. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan ranah kepolisian.
2	Penipuan online #8844766 Tanggal Aduan : 2 April 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan penjualan kamera digital pada aplikasi Instagram dan Whatsapp.	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan ranah kepolisian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	(Selengkapnya...)				
3	Bau tak sedap dan banyaknya lalat di daerah kintamani #8850576 Tanggal Aduan : 5 April 2025 Ringkasan Aduan : Mohon perbaiki sistem dan teknik pengolahan sampah di ujung Kintamani yang membuat adanya banyak lalat dan bau tidak sedap mengganggu tempat wisata. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Bangli		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Bangli karena lokasi pengolahan sampah berada di Kintamani.
4	Penipuan beserta menyebarkan data diri (KTP) #8861841 Tanggal Aduan : 9 April 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan iklan pinjaman dana pribadi di Facebook dan penyalahgunaan data pribadi KTP untuk dijadikan postingan. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi ranah kepolisian.
5	Help request - fraud from Bali resident #8865351 Tanggal Aduan : 9 April 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan kerjasama travel agency Bali yang menghilang setelah tandatangan kontrak dan pembayaran, sudah lapor polisi tetapi terkendala posisi di Eropa. (Selengkapnya...)	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan merupakan ranah kepolisian.
6	Dumas Kecurigaan Penggunaan Obat Terlarang #8853006 Tanggal Aduan : 10 April 2025 Ringkasan Aduan : Kecurigaan peredaran narkoba di Ph*enix Kuta Bali, mohon sering dilakukan patroli. (Selengkapnya...)	Badan Narkotika Nasional		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional karena tindak penggunaan narkoba ranah BNN.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
7	Listrik sering mati di area Jimbaran, Bali #8879646 Tanggal Aduan : 13 April 2025 Ringkasan Aduan : Tolong dibenahi listrik di area Jimbaran Asri sering mati. (Selengkapnya...)	Kementerian BUMN		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kementerian BUMN karena wewenang daya listrik perumahan ranah PLN.
8	URGENT - WNA Nakal di Bali #8870381 Tanggal Aduan : 14 April 2025 Ringkasan Aduan : Mohon ditindak WNA bekerja secara ilegal di Bali sebagai guru yoga dengan visa investor. (Selengkapnya...)	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Daerah Bali karena kasus penindakan WNA ranah keimigrasian.
9	Dugaan tidak adanya izin di sekolah Caterpillar School Bali #8886476 Tanggal Aduan : 14 April 2025 Ringkasan Aduan : Dugaan sekolah preschool milik WNA tidak memiliki ijin sudah berdiri selama 13 tahun. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Perijinan Kabupaten Badung karena ijin sekolah PAUD ranah Pemerintah Kabupaten Kota.
10	Penipuan Judi Online scam #8909151 Tanggal Aduan : 27 April 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan mendapatkan kembali uang yang tertipu setelah deposit judi online. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan ranah kepolisian.
11	Penipuan Judi Online scam #8909131 Tanggal Aduan : 27 April 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan mendapatkan kembali uang yang tertipu setelah	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan ranah kepolisian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	deposit judi online. (Selengkapnya...)				
12	Penipuan #8924371 Tanggal Aduan : 30 April 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan pembelian tiket konser pada kolom komentar postingan sosial media. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan ranah kepolisian.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.

NIP. 19790924 200803 1 001



Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
 Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
 2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
 Tanggal : 2 Juni 2025
 Nomor : **B.14.000/4217/IKP/D.KOMINFOS**
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : ***Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Mei s.d. 31 Mei 2025***

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
802	0	0	8	794

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Pelanggaran Hak Normatif Karyawan #8678946 Tanggal Aduan : 26 Februari 2025 Ringkasan Aduan : Beberapa pelanggaran hak normatif karyawan oleh	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 7 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	perusahaan. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1ndo9OLpBTUzGwfU5Z881wRXNrCjCwwL?usp=drive_link
2	Mohon Penertiban Atv Yang Menggunakan Jalan Umum, Di Jalan Raya Silakarang Desa Singapadu Kaler Karena Membuat Macet, Meresahkan, Dan Melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Dan Pp No 5 Tahun 2021 #8926191 Tanggal Aduan : 1 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Dikeluhkan kembali usaha ATV yang beroperasi menggunakan jalan umum Silakarang Singapadu yang mengganggu dan menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan, mohon penertiban karena sudah melanggar Undang-Undang. (Selengkapnya...)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindaklanjut Instansi : 8 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1FW01dH2YOG91pHB4fIGDRmuSjKVzcrX?usp=drive_link
3	Mohon Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Saya Di Span Lapor Terkait Penertiban Atv Yang Menggunakan Jalan Umum, Di Jalan Raya Silakarang Desa Singapadu Kaler Karena Membuat Macet, Meresahkan, Dan Melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 #8943293 Tanggal Aduan : 6 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan Satpol PP Provinsi Bali untuk menertibkan usaha ATV yang menggunakan jalan umum Silakarang Singapadu karena mengganggu dan membahayakan.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindaklanjut Instansi : 8 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1bIj3W4rh5RmpzF1HEpehEzXpuyLwcrX7?usp=drive_link

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	(Selengkapnya...)				
4	Jalan Rusak #8943697 Tanggal Aduan : 15 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon diperhatikan jalan rusak semakin parah di utara Puskesmas Tampaksiring 1 menuju Tegalalang. (Selengkapnya...)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1BEbgV3o5qMI0-zOi3a7allbkzXcQ2BIS?usp=drive_link
5	Pengusiran Dan Phk Sepihak Yang Dilakukan Oleh Owner #8972409 Tanggal Aduan : 16 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Pengusiran dan PHK sepihak oleh owner perusahaan kepada karyawan dalam masa probation yang tidak melakukan kesalahan, phk tanpa memberi kesempatan peringatan dahulu. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 5 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1j45x027EhlhcVRRwaYR8_dDuCgrl6Uyj?usp=drive_link
6	Bpjs Ketenagakerjaan Dan Pemecatan #8972077 Tanggal Aduan : 16 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan tidak menerapkan bpjs ketenagakerjaan untuk karyawan dan sering melakukan pemecatan secara tidak jelas. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1aGSz3d6dmeieg6aevcvSonMHKShLeLFI

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
					?usp=drive link
7	Noise complaint - Triple Nine Resto and Karaoke #8996957 Tanggal Aduan : 24 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Restoran melanggar aturan kebisingan memainkan musik sampai jam 3 pagi mengganggu ketenangan sekitar, owner sudah diperingati tetapi ditolak, mohon bantuan tindak agar mengecilkan musik diatas jam 1o malam dan mengikuti aturan hukum batas kebisingan . (Selengkapnya...)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindaklanjut Instansi : 8 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1gPAGje5Aq3GrqzyLGq12LG8WFI49r0RA?usp=drive link
8	Pencairan Kip #8999557 Tanggal Aduan : 26 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon informasi terkait pencairan KIP tingkat SD, SMP dan SMK apakah tidak bersamaan karena ada yang sudah cair ada yang belum . (Selengkapnya...)	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu Tindaklanjut Instansi : 12 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1vKOhoAI-ceX0BgcSDm4BluJ4KWJVLsXQ?usp=drive link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Menyalakan speaker keras, karaoke di malam hari # 8935836 Tanggal Aduan : 4 Mei 2025	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait alamat lokasi kejadian, serta bukti pendukung

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Ringkasan Aduan : Gangguan kebisingan/ketentraman umum di lingkungan perumahan akibat menyalakan musik dan karaoke sampai jam 10 malam, mohon pihak berwenang membuat kebijakan terkait hal ini. (Selengkapnya...)				lainnya
2	Saya ditipu untuk pembayaran # 8935826 Tanggal Aduan : 4 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Saya ditipu dan diminta untuk melapor disini. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lokasi (kota/kab), waktu, kronologis tidak jelas, serta bukti pendukung lainnya
3	Perusahaan menahan gaji karyawan yang resign #8939397 Tanggal Aduan : 5 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Gaji bulan sebelumnya tidak cair setelah resign diawal bulan, sudah mencoba menghubungi perusahaan tetapi tidak ada respon. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi, kronologis serta bukti pendukung lainnya
4	KETENTRAMAN DILINGKUNGAN UMUM #8940525 Tanggal Aduan : 5 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon ditindak tempat karaoke tidak berijin yang sangat mengganggu karena bernyanyi sampai jam 11/12 malam. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lokasi alamat tempat yang dimaksud (kota/kab), waktu, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
5	Cek nik ktp #8941809 Tanggal Aduan : 6 Mei 2025 Ringkasan Aduan :	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi nomor NIK, lokasi domisili (kota/kab), waktu, kronologis,

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Pengecekan NIK KTP apakah sudah terdaftar di Dinas Dukcapil. (Selengkapnya...)				serta bukti pendukung lainnya
6	Saya di tipu membeli tas online #8957025 Tanggal Aduan : 10 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan pembelian tas di Instagram, setelah transfer uang tidak di respon. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat bukti dukung yang jelas, lokasi (kota/kab), waktu, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
7	Uang cuti dan uang bpjs ketenagakerjaan yang dipotong tapi tidak dibayarkan #8958029 Tanggal Aduan : 11 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Hak pekerja meliputi uang cuti dan bpjs tidak dibayarkan oleh perusahaan di tempat lama bekerja. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi terkait perusahaan, lokasi (kota/kab), waktu, kronologis, serta bukti pendukung lainnya
8	Kehilangan ktp # 8995761 Tanggal Aduan : 23 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Ingin melacak data KTP apakah NIK masih valid atau tidak. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait lokasi domisili, No NIK, kronologis serta bukti pendukung lainnya

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Seorang turis Rusia sedang merekam video komersial di Bali #8934941	Kementerian Imigrasi dan Permasayarakat		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Imigrasi Daerah Bali karena

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Tanggal Aduan : 5 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Seorang WNA merekam video untuk keperluan komersial. (Selengkapnya...)	an RI			tindak terhadap WNA ranah keimigrasian.
2	Pemotongan Luas Tanah Hak Milik #8934926 Tanggal Aduan : 5 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Pengukuran tanah untuk meletakkan patok permanen dengan meminta bantuan ATRBPN Klungkung, hasil pengukuran luas tanah berkurang. (Selengkapnya...)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang ATRBPN Daerah Bali karena pengukuran tanah ranah badan pertanahan.
3	Layanan air minum #8939861 Tanggal Aduan : 5 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Aliran air mati dari pagi di BTN Pesinggahan Klungkung. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Klungkung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang PDAM Klungkung karena masalah aliran air ranah PDAM dibawah Pemerintah Daerah.
4	Bakar Sampah #8952345 Tanggal Aduan : 9 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan membakar sampah yang polusinya menyebabkan anak warga sampai sakit. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang DLHK Pemkot Denpasar karena lokasi berada di wilayah Denpasar.
5	Penipuan online mengatasnamakan warung perkakas bali #8951453 Tanggal Aduan : 11 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan pembelian alat perkakas melalui nomor telepon yang tertera pada lokasi di Google Maps, uang sudah ditransfer.	Kepolisian Daerah Bali		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Polda Bali karena kasus penipuan ranah dari kepolisian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	(Selengkapnya...)				
6	Kompensasi Tidak Dibayar Perusahaan #8964093 Tanggal Aduan : 14 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon tindaklanjuti perusahaan tidak mau membayar kompensasi karyawan yang sudah resign. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan Disnaker Pemkab Badung karena perselisihan hak tugas mediator hubungan industrial Kabupaten Kota.
7	Scam website #8977145 Tanggal Aduan : 18 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon perlindungan akibat penipuan scam website yang sudah terlanjur mengisi data dan alamat pribadi. (Selengkapnya...)	Kementerian Komunikasi dan Digital		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital untuk takedown website scam.
8	Permintaan data penelitian #8976997 Tanggal Aduan : 18 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Permintaan akses data terkait sumur bor di wilayah kecamatan Manggis. (Selengkapnya...)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kementerian ESDM karena saat data sumur bor ditangani Badan Geologi.
9	Penipuan obat di google # 8990401 Tanggal Aduan : 22 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan penjualan obat di Google setelah transfer barang tidak dikirim. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan merupakan ranah kepolisian.
10	Penipuan online #8992089 Tanggal Aduan : 23 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Kasus penipuan online berkedok	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan Kepolisian Daerah Bali karena kasus penipuan merupakan ranah kepolisian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	pengerjaan tugas dengan syarat transfer terlebih dahulu ke perusahaan tetapi tidak ujung dikembalikan. (Selengkapnya...)				

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.
NIP. 19790924 200803 1 001



NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 1 Juli 2025
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Juni s.d. 30 Juni 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 Juni s.d 30 Juni 2025, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
811	0	0	5	806

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Mohon Penertiban Atv Yang Menggunakan Jalan Umum, Di Jalan Raya Silakarang Desa Singapadu Kaler Karena Membuat Macet, Meresahkan, Dan Melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Dan Pp No 5 Tahun 2021 #8926191	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali		✓	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 4 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	Tanggal Aduan : 1 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Dikeluhkan kembali usaha ATV yang beroperasi menggunakan jalan umum Silakarang Singapadu yang mengganggu dan menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan, mohon penertiban karena sudah melanggar Undang-Undang. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1FW01dH2YOG91pHB4fIGDRmuSjKVzcrX?usp=drive_link
2	Mohon Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Saya Di Span Lapor Terkait Penertiban Atv Yang Menggunakan Jalan Umum, Di Jalan Raya Silakarang Desa Singapadu Kaler Karena Membuat Macet, Meresahkan, Dan Melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 #8943293 Tanggal Aduan : 6 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan Satpol PP Provinsi Bali untuk menertibkan usaha ATV yang menggunakan jalan umum Silakarang Singapadu karena mengganggu dan membahayakan. (Selengkapnya...)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 10 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1bIj3W4rh5RmpzF1HEpehEzXpuyLwcrX7?usp=drive_link
3	Noise complaint - Triple Nine Resto and Karaoke #8996957 Tanggal Aduan : 24 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Restoran melanggar aturan kebisingan memainkan musik sampai jam 3 pagi mengganggu ketenangan sekitar, owner sudah diperingati tetapi ditolak, mohon bantuan tindak agar mengecilkan musik diatas jam 1o malam dan mengikuti aturan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 1 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1gPAGje5Aq3GrqzyLGq12LG8WFI49r0RA?

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	hukum batas kebisingan . (Selengkapnya...)				usp=drive link
4	Penambalan Jalan Asal-Asalan #9026473 Tanggal Aduan : 8 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Mohon dilakukan pengecekan kembali penambalan jalan di sepanjang jalan banyuning Buleleng yang asal-asalan sangat gembur dan cepat rusak. (Selengkapnya...)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 5 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1BniKjXH9zpl2tfirUvcDbRzpEyY4JuA1?usp=drive link
5	Pelanggaran Hak Karyawan Oleh Perusahaan #9073746 Tanggal Aduan : 23 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan diantaranya tidak ada kontrak kerja, gaji yang belum diberikan, tidak ada penugasan kerja yang menimbulkan ketidakpastian status kerja. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 7 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1MxGWVXL8kcZu8DaV7urkAXHhhsAIDZ8-?usp=drive link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Pemecatan Karyawan melalui Chat #9018621 Tanggal Aduan : 5 Juni 2025	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait lokasi alamat perusahaan,

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Ringkasan Aduan : PHK sepihak oleh perusahaan GurlBucket secara mendadak tanpa peringatan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Selengkapnya...)				kronologis serta bukti pendukung lainnya
2	INFORMASI ALAMAT #9034573 Tanggal Aduan : 11 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan pengecekan alamat di KTP untuk keperluan mendaftar NPWP. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait identitas seperti no NIK, nama untuk proses pengecekan, kronologis serta bukti pendukung lainnya
3	JALAN BERLUBANG #9044347 Tanggal Aduan : 14 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Jalan berlubang di jalan lingkaran timur Udayana. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi jelas terkait lokasi jalan yang dimaksud, kronologis serta bukti pendukung lainnya

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Evaluasi Penerapan 9 Kode Etik Kepariwisata di Kabupaten Jembrana #9017585 Tanggal Aduan : 4 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Mohon partisipasi dalam pengisian data terkait pariwisata di wilayah Kabupaten Jembrana untuk penelitian. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Jembrana		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana karena data yang diminta di wilayah Jembrana.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
2	Penipuan Online Gibby Snaps di Bali, Indonesia #9018901 Tanggal Aduan : 5 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan pembelian kamera second pada akun instagram @gibby_snaps_. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Kepolisian terkait kasus penipuan.
3	Bos yang tidak memberikan hak gaji #9022825 Tanggal Aduan : 8 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Hak gaji yang tidak dibayarkan setelah resign oleh perusahaan, mohon ditindak. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Badung terkait perselisihan hak pekerja.
4	Penipuan uang #9026221 Tanggal Aduan : 8 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan untuk masuk kerja diperusahaan oleh oknum, pembayaran sudah dilakukan tetapi hasil tidak lolos diperusahaan tersebut dan uang tidak dikembalikan sesuai janji. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Bareskrim Kepolisian terkait kasus penipuan.
5	Laporan Pelanggaran Hak Investor dalam Proyek The Umalas Signature – Bali #9033229 Tanggal Aduan : 12 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang proyek properti di Umalas Badung yang tidak memberikan hak investor untuk akses properti serta tidak dilakukan pembagian hasil atas sewa properti. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Perijinan Kabupaten Badung karena ranah penanaman modal asing dan lokasi proyek di wilayah Badung.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
6	JALAN BERLUBANG #9060276 Tanggal Aduan : 19 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Jalan berlubang di pintu masuk jalan Lingkar Timur Udayana Jimbaran. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas PUPR Kabupaten Badung karena lokasi berada di Jimbaran dan bukan peta jalan milik Pemerintah Provinsi.
7	Mau pelaporkanan wbp #9059671 Tanggal Aduan : 19 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Warga binaan pemasyarakatan yang membuat keluarga di grebeg kanwil. (Selengkapnya...)	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Lapas Kabupaten Karangasem karena ranah menindak WBP wewenang petugas lapas.
8	JALAN BERLUBANG #9089397 Tanggal Aduan : 26 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Jalan berlubang di jalan Panorama Jimbaran, Kabupaten Badung. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas PUPR Kabupaten Badung karena lokasi berada di Jimbaran dan bukan peta jalan milik Pemerintah Provinsi.
9	Jalan Raya Takmung Tojan Berlubang Parah #9050957 Tanggal Aduan : 30 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Mohon perbaikan jalan berlubang parah di Desa Takmung, Klungkung. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Klungkung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas PUPR Kabupaten Klungkung karena lokasi berada di Klungkung dan bukan peta jalan milik Pemerintah Provinsi.

Pengaduan yang **Diarsipkan** karena isi pengaduan yang kurang jelas atau laporan berulang, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Gembel berkeliaran di kantor # 9026245 Tanggal Aduan : 8 Juni 2025	-		✓	(Diarsipkan) Isi pengaduan kurang jelas serta tindak terhadap anak

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Ringkasan Aduan : Kecurigaan terhadap anak magang yang bekerja di hotel yang berpenampilan tidak menarik seperti gembel. (Selengkapnya...)				magang merupakan wewenang dari pihak perusahaan
2	Triple Nine 999 Resto & Karaoke Bar - Continued Noise Violation #9084361 Tanggal Aduan : 25 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Laporan kedua terkait kebisingan oleh restoran Triple Nine 999 yang masih membuat kebisingan setelah proses tindak oleh Satpol PP. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan berulang sudah pernah dilaporkan sebelumnya, hasil pengecekan aduan sebelumnya nomor #8996957 masih dalam tahap diproses dan sudah ditanggapi kembali oleh Satpol PP Provinsi Bali.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.

NIP. 19790924 200803 1 001



පිළිගිණු ආචාරිකාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
රාජ්‍ය සන්නිවේදන, පරිගණක තාක්ෂණ (පද්ධති) සහ සංඛ්‍යා විද්‍යා අමාත්‍යාංශය
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 1 Agustus 2025
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Juli s.d. 31 Juli 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 Juli s.d 31 Juli 2025, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
820	0	0	6	814

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Mohon Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Saya Di Span Lapor Terkait Penertiban Atv Yang Menggunakan Jalan Umum, Di Jalan Raya Silakarang Desa Singapadu Kaler Karena Membuat Macet, Meresahkan, Dan Melanggar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		✓	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 7 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	#8943293 Tanggal Aduan : 6 Mei 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan Satpol PP Provinsi Bali untuk menertibkan usaha ATV yang menggunakan jalan umum Silakarang Singapadu karena mengganggu dan membahayakan. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1bIj3W4rh5RmpzF1HEpehEzXpuyLwcrX7?usp=drive_link
2	Pelanggaran Ketenagakerjaan #9137161 Tanggal Aduan : 7 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan Disnaker perusahaan tidak menghapus BPJS Kesehatan setelah berhenti bekerja sehingga layanan tidak bisa digunakan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 2 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1ntSEFSFSJLQHhgnKCafZq24ijFLeGWb?usp=drive_link
3	Triple Nine 999 Resto & Karaoke Bar - Continued Noise Violation And Neighborhood Abuse #9208576 Tanggal Aduan : 21 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Keluhan terhadap kebisingan oleh restoran & karaoke bar yang kembali dilakukan setelah pernah dilakukan penindakan, bahkan musik disetel lebih kencang. (Selengkapnya...)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Jawaban Instansi ditanggapi Pengadu Batas Sisa Waktu Tindaklanjuti Instansi : 5 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/14K57pZuBHDaJGTTK0vst15JFyoqVEeZC?usp=drive_link
4	Tolong Pemerintah Lebih Tegas Untuk Kegiatan Galian C Ilegal Yg Melanggar Uu #9203976 Tanggal Aduan : 25 Juli 2025	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	Ringkasan Aduan : Galian C tetap berlangsung secara diam” walau sudah dilakukan tindak dan pembinaan oleh instansi pemerintah. (Selengkapnya...)				Batas Sisa Waktu (Close by System) : 8 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1x7LNTMZyY_eiR9qzi8-2wFEFNuCMMt5Q?usp=drive_link
5	Tidak Dibayarkan Gaji Oleh Dni Skin Centre #9189141 Tanggal Aduan : 31 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Gaji untuk periode kerja sebelum mengundurkan diri tidak dibayarkan oleh perusahaan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 13 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1c5O4liKetS5tZeYu2ampG5x7t5mQvSXG?usp=drive_link
6	Laporan Lanjutan Atas Tracking Id #9073746 #9242946 Tanggal Aduan : 31 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon informasi dan update tindaklanjut terhadap laporan pengaduan sebelumnya terkait pelanggaran hak ketenagakerjaan oleh pt home tech universe. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 13 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1BAIWDPZ_EZYdsMOlxvkn6lwFTjk8Xbge?usp=drive_link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Pemecatan Karyawan melalui Chat #9018621 Tanggal Aduan : 5 Juni 2025 Ringkasan Aduan : PHK sepihak oleh perusahaan GurlBucket secara mendadak tanpa peringatan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait lokasi alamat perusahaan, kronologis serta bukti pendukung lainnya
2	INFORMASI ALAMAT #9034573 Tanggal Aduan : 11 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan pengecekan alamat di KTP untuk keperluan mendaftar NPWP. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait identitas seperti no NIK, nama untuk proses pengecekan, kronologis serta bukti pendukung lainnya
3	JALAN BERLUBANG #9044347 Tanggal Aduan : 14 Juni 2025 Ringkasan Aduan : Jalan berlubang di jalan lingkaran timur Udayana. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi jelas terkait lokasi jalan yang dimaksud, kronologis serta bukti pendukung lainnya

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Dumas Kecurigaan Penggunaan Obat Terlarang #9089505 Tanggal Aduan : 1 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon dilakukan patroli di Phoenix	Badan Narkotika Nasional		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Badan Narkotika Wilayah Bali karena ranah tindak narkotika bukan ranah

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	KTV Kuta Bali karena curiga ada peredaran narkoba di dalamnya. (Selengkapnya...)				Pemerintah Provinsi.
2	Kepengurusan Sangat Tidak Efisien #9116641 Tanggal Aduan : 2 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Pelayanan persetujuan pencatatan kependudukan di Kantor Camat Kuta Selatan yang tidak efisien. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung karena tanggungjawab Camat berada di bawah Bupati/Walikota.
3	LAMPU JALAN #9119156 Tanggal Aduan : 2 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Permintaan penambahan lampu jalan di Jalan Kampus Udayana Jimbaran. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Badung karena lokasi berada di Jimbaran dan bukan peta jalan milik Pemerintah Provinsi.
4	PERIHAL PENGADUAN ANAK TIDAK BISA DAFTAR SEKOLAH DI SD LEWAT ONLINE #9119156 Tanggal Aduan : 2 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon atensi dan bantuan error pada website pendaftaran Sekolah Dasar Pemerintah Kabupaten Badung. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Badung karena ranah Sekolah Dasar di bawah Pemerintah Kabupaten Kota.
5	Salah mendaftarkan email belajar id di Survei Pengelolaan Kinerja di SICIPTA #9142441 Tanggal Aduan : 8 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan reset ulang registrasi pada web SICIPTA untuk mengisi survey pengelolaan kinerja. (Selengkapnya...)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang KemenDikDasMen karena sistem dikembangkan oleh kementerian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
6	Ada orang mirip napi kabur di kantor tempat saya bekerja #9148901 Tanggal Aduan : 9 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantuan penyelidikan tukang di kantor yang mirip bekas tahanan napi kabur. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena ranah penyelidikan narapidana bukan ranah Pemerintah Provinsi.
7	Penipuan Scammer #9155006 Tanggal Aduan : 10 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan oleh teman mengajak gabung untuk mendapat pendapatan dari Tiktok dengan syarat transfer senilai 20jt. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena ranah kasus penipuan ranah dari pihak kepolisian.
8	Penipuan online #9158666 Tanggal Aduan : 11 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon bantu pemblokiran rekening BCA karena melakukan penipuan meminta transfer untuk pertolongan adik yang dikatakan sakit di kapal. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena ranah kasus penipuan ranah dari pihak kepolisian.
9	Permohonan Klarifikasi Zonasi – Jl. Raya Air Sanih No.16, Desa Bukti, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng #9175976 Tanggal Aduan : 14 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Permohonan klarifikasi resmi mengenai status peruntukan lahan zona kuning yang akan digunakan untuk usaha properti. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Buleleng		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas PUPR Kabupaten Buleleng karena lokasi lahan berada di Kabupaten Buleleng.
10	Judi Sabung Ayam di Bali #9175031 Tanggal Aduan : 14 Juli 2025 Ringkasan Aduan :	Kepolisian Negara Republik		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	Tolong berantas perjudian sabung ayam di seluruh Bali. (Selengkapnya...)	Indonesia			ranah tindak kegiatan perjudian bukan ranah Pemerintah Provinsi.
11	Pembakaran sampah setiap hari dan berbahaya bagi kesehatan #9188011 Tanggal Aduan : 16 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Pembakaran sampah oleh tetangga setiap hari yang mengganggu dan membahayakan kesehatan. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kota Denpasar		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang DKLH Kota Denpasar karena lokasi berada di wilayah Denpasar.
12	Food safety issue #9172801 Tanggal Aduan : 16 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Permohonan investigasi cafe di Kedungu yang menyediakan makanan berbahaya menyebabkan keracunan. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Tabanan		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan karena lokasi cafe berada di wilayah Tabanan.
13	Penipuan Kost Jimbaran, Bali #9186996 Tanggal Aduan : 16 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan penyewaan kost daerah Jimbaran dan sudah melakukan transfer uang. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kepolisian Daerah Bali karena ranah kasus penipuan merupakan ranah dari pihak kepolisian.
14	Safety Complaint: Unannounced Male Entry While Undressed at Villa in Bali #9198711 Tanggal Aduan : 19 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Keluhan keamanan, seorang staf pria masuk tanpa pemberitahuan ke dalam Villa saat sedang tidak berpakaian. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Badung karena lokasi villa berada di wilayah Mengwi, Kabupaten Badung.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
15	To the Esteemed Government of the Republic of Indonesia #9202651 Tanggal Aduan : 20 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon pertimbangkan terkait rencana pembongkaran kios sepanjang pantai Bingin untuk melindungi kawasan berharga ini dari pembangunan komersial proyek-proyek berskala besar. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Satpol PP Pemerintah Kabupaten Badung karena lokasi Kios berada di wilayah Pantai Bingin, Kabupaten Badung.
16	Mohon pengecekan status perijinan perusahaan penanaman modal asing (PT PMA) #9222856 Tanggal Aduan : 24 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Permohonan informasi terkait status legalitas perusahaan penanaman modal asing. (Selengkapnya...)	Badan Koordinasi Penanaman Modal		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal karena ranah terkait penanaman modal asing menjadi wewenang BKPM sesuai peraturan.
17	Pembangunan rumah tanpa SLF/PBG #9224926 Tanggal Aduan : 25 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Tolong ditindaklanjuti pembangunan rumah yang tidak mengindahkan peraturan dengan jarak kurang dari 3 meter dari jalan. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung karena ranah terkait perijinan SLF/PBG wewenang Dinas Perijinan Kabupaten Badung.
18	Melaporkan Buronan Kasus Penipuan China Yang Berada Di Wilayah Indonesia #9227261 Tanggal Aduan : 25 Juli 2025 Ringkasan Aduan : WNA China buronan kasus penipuan berdomisili di Bali dan menjalankan usaha restoran dengan data identitas paspor	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Keimigrasian Wilayah Bali karena ranah terkait penindakan WNA wewenang pihak Keimigrasian.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	palsu. (Selengkapnya...)				

Pengaduan yang **Diarsipkan** karena isi pengaduan yang kurang jelas atau laporan berulang, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Galian C Ilegal Di Kelating Tabanan Setahun Lebih Berlangsung # 9134426 Tanggal Aduan : 8 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon penertiban sudah 4 kali dilaporkan terkait galian C di Desa Kelating Tabanan tetapi kegiatan masih berlangsung. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan berulang sudah dilaporkan sebelumnya dihari yang sama, aduan sebelumnya nomor #9134406 masih dalam tahap diproses oleh Satpol PP Provinsi Bali.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.
NIP. 19790924 200803 1 001



NOTA-DINAS

Yth. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Dari : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tembusan : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Tanggal : 2 Juni 2025
Nomor : **B.14.000/4217/IKP/D.KOMINFOS**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Bulanan SP4N-LAPOR! Mulai dari Tanggal 1 Agustus s.d. 31 Agustus 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.baliprov.lapor.go.id, yang diterima admin Pejabat Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari tanggal 1 Agustus s.d 31 Agustus 2025, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Data Belum Lengkap	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
824	0	0	7	817

Rekap Pengelolaan Pengaduan oleh **Pejabat Penghubung (OPD)**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1	Triple Nine 999 Resto & Karaoke Bar - Continued Noise Violation And Neighborhood Abuse #9208576 Tanggal Aduan : 21 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Keluhan terhadap kebisingan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		✓	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 6 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	oleh restoran & karaoke bar yang kembali dilakukan setelah pernah dilakukan penindakan, bahkan musik disetel lebih kencang. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/14K57pZuBHdaJGTTK0vst15JFyqVEeZC?usp=drive_link
2	Tidak Dibayarkan Gaji Oleh Dni Skin Centre #9189141 Tanggal Aduan : 31 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Gaji untuk periode kerja sebelum mengundurkan diri tidak dibayarkan oleh perusahaan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 1 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1c5O4liKetS5tZeYu2ampG5x7t5mQvSXG?usp=drive_link
3	Laporan Lanjutan Atas Tracking Id #9073746 #9242946 Tanggal Aduan : 31 Juli 2025 Ringkasan Aduan : Mohon informasi dan update tindaklanjut terhadap laporan pengaduan sebelumnya terkait pelanggaran hak ketenagakerjaan oleh pt home tech universe. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 6 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1BAIWDPZ_EZYdsMOlxvkn6lwFTjk8Xbge?usp=drive_link
4	Phk Sepihak Pt Best(Berlian Emas Sejahtera Terpadu) Bali #9256819 Tanggal Aduan : 5 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan melakukan PHK sepihak kepada 18 karyawan tanpa memberikan kompensasi.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 1 hari Link Bukti Dukung :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	(Selengkapnya...)				https://drive.google.com/drive/folders/1H-fABVYafHFIWabbHpGh39NcYcpAcQB?usp=drive_link
5	Pelanggaran Atas Pkwt Masa Percobaan 3 Bulan Pt Bali Hai Brewery Indonesia #9268549 Tanggal Aduan : 11 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan mensyaratkan masa percobaan 3 bulan untuk kontrak pkwt yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta gaji tidak dibayarkan karena dalam masa percobaan. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 8 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1teyls9i3zt8CYY3rDxl-zcT9-q3s3t?usp=drive_link
6	Penahanan Gaji #9282906 Tanggal Aduan : 15 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Owner perusahaan menahan gaji karena mendadak pulang kampung terdapat musibah dan gaji akan dibayar setelah bekerja kembali. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 6 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1OXqY1StgxDs2LZ7H6gwySZYv4rVD6C9s?usp=drive_link
7	Triple Nine Resto - Formal Complaint Regarding Ongoing Noise Ordinance Violations #9285566 Tanggal Aduan : 16 Agustus 2025 Ringkasan Aduan :	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah di Respon Awal oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 10 hari

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	Penyampaian formal komplain terhadap kebisingan oleh Triple Nine Resto yang tidak kunjung selesai, 50 laporan sudah dibuat oleh warga dan pengusaha hospitality di sekitar mulai dari laporan ke lurah kepolisian dan pemerintah tetapi tidak berarti. (Selengkapnya...)				Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1kCr8Ur-lzvndPndrVQXi0p2M4oQoOFIF?usp=drive_link
8	Laporan Ketidakadilan Di Tempat Bekerja #9326256 Tanggal Aduan : 25 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Tekanan beban kerja yang berlebihan menyebabkan depresi dan tidak dapat istirahat yang merupakan hak pekerja di Yayasan TK Budhi Nirmala. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 9 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1c5dVe-Ugupoj1JqItKuECzwYJ6ggWiB?usp=drive_link
9	Laporan Ketidakadilan Di Tempat Bekerja #9326256 Tanggal Aduan : 25 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Tekanan beban kerja yang berlebihan menyebabkan depresi dan tidak dapat istirahat yang merupakan hak pekerja di Yayasan TK Budhi Nirmala. (Selengkapnya...)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	Status : Pengaduan sudah ditanggapi oleh Instansi Batas Sisa Waktu (Close by System) : 9 hari Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1c5dVe-Ugupoj1JqItKuECzwYJ6ggWiB?usp=drive_link

Pengaduan yang **Ditunda** karena masih menunggu kelengkapan informasi, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Penahanan gaji #9265461 Tanggal Aduan : 10 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Gaji tidak diberikan oleh owner sampai kembali bekerja dikarenakan pulang kampung mendadak karena kakek meninggal. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi, kronologis serta bukti pendukung lainnya
2	APAKAH PERLU MENGIRIM SURAT SECARA OFFLINE KE DINAS? #9244426 Tanggal Aduan : 11 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Permohonan informasi terkait pengajuan surat permohonan dan rekomendasi usaha berbasis resiko melalui sistem OSS. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait lokasi (kab/kota) tempat usaha, kronologis serta bukti pendukung lainnya
3	Pemberhentian karyawan secara sepihak dan tanpa kompensasi #9272157 Tanggal Aduan : 12 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan tidak memberikan uang kompensasi sesuai pada kontrak kerja dan pemberhentian karyawan secara sepihak. (Selengkapnya...)	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi (kab/kota), kronologis yang jelas serta bukti pendukung lainnya
4	Tuntutan hak yang tidak di bayar #9272137 Tanggal Aduan : 12 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan diantaranya pengurangan gaji tanpa	-		√	(Tertunda) Tidak terdapat informasi lengkap terkait perusahaan, lokasi (kab/kota), kronologis yang jelas serta bukti pendukung lainnya

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	pemberitahuan dan THR tidak dibayarkan. (Selengkapnya...)				

Pengaduan yang merupakan **Bukan Wewenang** dari Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Dugaan Pungutan Liar di Area Parkir Pantai Gondol, Buleleng #9257095 Tanggal Aduan : 5 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Melaporkan indikasi pungutan liar oleh pihak mengaku pengelola dengan karcis yang tidak resmi tidak terdapat nama instansi atau bukti legalitas. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Buleleng		√	Sudah diteruskan dan merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng karena lokasi pantai di wilayah Kabupaten Buleleng.
2	Dugaan Pungutan Liar di Area Parkir Pantai Gondol, Buleleng #9257099 Tanggal Aduan : 5 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Melaporkan indikasi pungutan liar oleh pihak mengaku pengelola dengan karcis yang tidak resmi tidak terdapat nama instansi atau bukti legalitas. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Buleleng		√	Sudah diteruskan dan merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng karena lokasi pantai di wilayah Kabupaten Buleleng.
3	Pungli Banjar Pelasa Legian #9278466 Tanggal Aduan : 15 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Dugaan pungutan liar oleh pihak Banjar kepada pendatang di luar Bali yang akan disetor ke Banjar. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Badung		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Kelurahan Legian di bawah Pemerintah Kabupaten Badung.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
4	PENIPUAN online #9288776 Tanggal Aduan : 17 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan mengaku sebagai kurir JNE mengatasnamakan perusahaan Psstore Jakarta. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan pihak kepolisian terkait kasus penipuan.
5	Warung tuak memutar musik dan karaoke dengan suara yang keras di malam hari #9300666 Tanggal Aduan : 20 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Warung tuak di Celagi Tabanan memutar musik dan karaoke dengan volume keras pada malam hari sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Tabanan		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Satpol PP Kabupaten Tabanan karena lokasi berada di wilayah Kabupaten Tabanan.
6	Laporan penipuan #9315176 Tanggal Aduan : 22 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan atas nama pengiriman paket di Tiktok dengan menggiring untuk melakukan pinjaman online, mohon ditindaklanjuti agar uang bisa kembali. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang pihak kepolisian terkait tindak kasus penipuan.
7	Warung tuak memutar musik dan karaoke dengan suara yang keras di malam hari #9300666 Tanggal Aduan : 20 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Warung tuak di Celagi Tabanan memutar musik dan karaoke dengan volume keras pada malam hari sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar. (Selengkapnya...)	Pemerintah Kabupaten Tabanan		✓	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang Satpol PP Kabupaten Tabanan karena lokasi berada di wilayah Kabupaten Tabanan.

No.	Isi Laporan Awal	Instansi yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
8	Laporan penipuan #9315176 Tanggal Aduan : 22 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Penipuan atas nama pengiriman paket di Tiktok dengan menggiring untuk melakukan pinjaman online, mohon ditindaklanjuti agar uang bisa kembali. (Selengkapnya...)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		√	Sudah diteruskan dan merupakan wewenang pihak kepolisian terkait tindak kasus penipuan.

Pengaduan yang **Diarsipkan** karena isi pengaduan yang kurang jelas atau laporan berulang, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
1	Kompensasi PKWT tidak dibayar PT BEST(BERLIAN EMAS SEJAHTERA TERPADU) #9256865 Tanggal Aduan : 5 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Kompensasi PKWT tidak dibayarkan oleh perusahaan. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan yang sama dilaporkan secara berulang di hari yang sama juga dengan konteks aduan yang sama.
2	IJAZAH DITAHAN PT BEST(BERLIAN EMAS SEJAHTERA TERPADU) BALI #9256871 Tanggal Aduan : 5 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Perusahaan melakukan penahanan ijazah selama kontrak kerja. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan yang sama dilaporkan secara berulang di hari yang sama juga dengan konteks aduan yang sama.
3	Warung tuak memutar musik dengan volume keras #9300716 Tanggal Aduan : 20 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Warung tuak di Celagi Tabanan	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan yang sama dilaporkan secara berulang di hari yang sama juga dengan

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	SUDAH	
	memutar musik dan karaoke dengan volume keras pada malam hari sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar. (Selengkapnya...)				konteks aduan yang sama.
4	Warung tuak memutar musik dengan volume keras #9300716 Tanggal Aduan : 20 Agustus 2025 Ringkasan Aduan : Warung tuak di Celagi Tabanan memutar musik dan karaoke dengan volume keras pada malam hari sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar. (Selengkapnya...)	-		√	(Diarsipkan) Pengaduan yang sama dilaporkan secara berulang di hari yang sama juga dengan konteks aduan yang sama.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, S.E., M.Si.
NIP. 19790924 200803 1 001